



# LAPORAN

## AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2022

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 disusun berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu satu tahun. Secara lengkap memuat laporan akuntabilitas yaitu laporan capaian terhadap target kinerja yang telah ditetapkan, perbandingan capaian tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya serta mengungkapkan keberhasilan dan kegagalan dalam upaya pencapaian target kinerja. LAKIP ini juga merupakan media pertanggungjawaban instansi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang secara terukur yang berorientasi hasil (*result oriented*).

Dengan LAKIP ini diharapkan tuntutan akuntabilitas sebagaimana tertuang dalam kebijakan reformasi birokrasi dapat terpenuhi, sehingga semakin mendorong terwujudnya Visi Bupati Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2019-2024. Dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 telah ditetapkan 6 sasaran strategis dengan 26 indikator kinerja dan 21 indikator pendukung.

Ada pun rumusan Sasaran Strategis sebagai penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan
- 2 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air
- 3 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Keciptakarya
- 4 Meningkatkan Kualitas Jasa Konstruksi
- 5 Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Ruang
- 6 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan strategi dan kebijakan dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Polewali, 15 Februari 2023  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG,**



**HUSAIN ISMAIL, ST., M.AP**  
NIP : 19720809 200502 1 003

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami panjatkan ke-Khadirat Allah SWT, karena atas Ridho dan perkenaan-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, dapat diselesaikan pada waktunya.

Sesuai dengan peraturan Presiden no 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Enitas Akuntabilitas Kinerja Dinas paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil dari pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar.

LAKIP ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governnace. Dalam arti luas LAKIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat ukur dan evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022. Mudah-mudahan, penyajian LAKIP Dinas PUPR menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan afesien, baik dari aspek perencanaan , pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja ini dan tercapainya target kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2022 .

Polewali, 15 Februari 2023  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG,**



**Ir. HUSAIN ISMAIL, ST., M.A.P**  
NIP : 19720809 200502 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR GRAFIK	
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
A.1 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN.....	2
A.2 MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN .....	3
B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	3
B.1. KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK .....	3
B.2. FUNGSI .....	4
B.3. SUSUNAN ORGANISASI .....	4
B.4. GAMBARAN UMUM KONDISI ORGANISASI .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS.....	14
A.1 VISI .....	14
A.2. MISI.....	15
A.3 TUJUAN DAN SASARAN.....	16
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. AKUNTABILITAS KINERJA .....	26

A.1.	MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR KEBINAMARGAAN.....	26
A.1.1.	PANJANG JALAN KABUPATEN KONDISI MANTAP.....	26
A.1.1.1.	PANJANG JALAN YANG TERBANGUN .....	27
A.1.1.2.	PANJANG JALAN KABUPATEN YANG DIREHABILITASI.....	29
A.1.1.3	JUMLAH JEMBATAN DALAM KONDISI BAIK.....	33
A.2.	MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR .....	37
A.2.1.	PERSENTASE JARINGAN IRIGASI DALAM KONDISI BAIK .....	38
A.2.1.1.	PANJANG SUNGAI YANG DIPELIHARA .....	38
A.2.1.2	PANJANG JARINGAN IRIGASI YANG DIREHABILITASI .....	39
A.2.1.3.	JUMLAH BENDUNG YANG TELAH DITINGKATKAN .....	42
A.3	MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN .....	45
A.3.1	Persentase Drainase Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik .....	45
A.3.1.1.	Panjang Drainase Yang Terbangun .....	45
A.3.2	Persentase Jalan Lingkungan Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik .....	48
A.3.2.1.	Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Perkotaan Yang Ditingkatkan .....	48
A.3.3	Persentase Pelayanan Akses Air Minum .....	51
A.3.3.1	Jumlah Penerima Manfaat Air Minum .....	51
A.3.4	Persentase Akses Sanitasi Layak .....	54
A.3.4.1	Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak .....	54
A.3.5	Persentase Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum Kondisi Baik .....	59
A.3.5.1	Jumlah Unit Bangunan Gedung Daerah yang Terbangun .....	59
A.3.6	Persentase Ketersediaan Sistem dan Prasarana Pengolahan Persampahan .....	61
A.3.6.1	Jumlah Unit TPS3R yang Terbangun .....	61
A.4.	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi .....	66
A.5.	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang .....	67

B. AKUTABILITAS KEUANGAN .....	68
BAB. IV PENUTUP .....	76

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Kondisi Kepegawaian.....	7
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan.....	7
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin.....	9
Tabel 1.4.	Data Kondisi Alat Berat .....	10
Tabel 2.1	Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penetapan Ruang Kab. Polewali Mandar TA.2022.....	20
Tabel 2.2	Program dan Anggaran Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020	20
Tabel 2.3.	Program dan Anggaran setelah Perubahan .....	21
Tabel 2.4	Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Polewali Mandar TA.2022.....	22
Tabel 3.1	Panjang Jalan Kabupaten yang terbangun.....	27
Tabel 3.2	Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten yang terbangun Tahun 2020, 2021 dan 2022.....	28
Tabel 3.3	Panjang Jalan Kabupaten Yang Direhabilitasi .....	30
Tabel 3.4	Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten yang Direhabilitasi Tahun 2020, 2021 dan 2022....	34
Tabel 3.5	Pemeliharaan Rutin Jalan 13 Ruas :.....	32
Tabel 3.6.	Kegiatan Pembangunan/Penggantian Jembatan.....	33
Tabel 3.7.	Perbandingan Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2020, 2021 dan 2022.....	34
Tabel 3.8	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan.....	35
Tabel 3.9	Kegiatan Normalisasi /Restorasi Sungai.....	38
Tabel 3.10	Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan .....	39
Tabel 3.11	Perbandingan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2020, 2021 dan 2022.....	40
Tabel 3.12	Kegiatan Peningkatan Bendung Irigasi.....	41
Tabel 3.13	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air.....	43
Tabel 3.14	Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase perkotaan.....	46

Tabel 3.15 Perbandingan Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase perkotaan Tahun 2020, 2021 dan 2022.....	47
Tabel 3.16 Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan.....	49
Tabel 3.17 Perbandingan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Tahun 2020, 2021 dan 2022...	50
Tabel 3.18 Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.....	51
Tabel 3.19 Perbandingan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2020, 2021 dan 2022.....	52
Tabel 3.20 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.....	54
Tabel 3.21 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020, 2021 dan 2022.....	55
Tabel 3.22. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.....	59
Tabel 3.23. Perbandingan Jumlah Unit Bangunan Gedung Daerah yang Terbangun Tahun 2020, 2021 dan 2022.....	60
Tabel 3.24. Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.....	61
Tabel 3.25 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciptakaryaan.....	62
Tabel 3.26 Program Penyelenggaraan Jalan .....	68
Tabel 3.27. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).....	69
Tabel 3.28. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.....	70
Tabel 3.29. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.....	70
Tabel 3.30. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum .....	71
Tabel 3.31. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah .....	71
Tabel 3.32. Program Penataan Bangunan Gedung .....	72

Tabel 3.33. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.....	71
Tabel 3.34. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang .....	73
Tabel 3,35. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.....	75

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Struktural Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	5
Gambar 1.2	Alat-Alat Berat Pada Dinas Pekerjaan Umum.....	12
Gambar 1.3	Alat Uji Material pada Laboratorium UPTD Workshop.....	13
Gambar 3.1	Peningkatan Jalan Ruas Lampoko - Pengesoran.....	28
Gambar 3.2	Pemeliharaan Jalan Ruas Padangmawalle-Patulang.....	31
Gambar 3.3	Pembangunan Jembatan Sanrego II Kecamatan Luyo.....	33
Gambar 3.4	. Normalisasi / Restorasi Sungai Landi Kanusuang.....	39
Gambar 3.5.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I Alapahang Desa Riso.....	40
Gambar 3.6	Peningkatan Bendung Irigasi Rattenallu.....	42
Gambar 3.7	Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Drainase Pasar Tinambung.....	47
Gambar 3.8	Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Belakang SD 23 Kelurahan Darma.....	49
Gambar 3.9.	Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan di Kelurahan Balanipa.....	52
Gambar 3.10.	Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Kel. Lantora Kec. Polewali .....	56
Gambar 3.11.	Dokumentasi Pembangunan Mesjid Jalan Kartini .....	.60
Gambar 3.12.	Dokumentasi Pembangunan TPS3R kelurahan Sidodadi.....	62

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	8
Grafik 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin .....	9
Grafik 3.1 Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten Yang Terbangun Tahun 2020, 2021 dan 2022.....	29
Grafik 3.2 Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten yang Direhabilitasi Tahun 2020, 2021 dan 2022...	31
Grafik 3.3 Perbandingan Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2020, 2021 dan 2022.....	34
Grafik 3.4 Perbandingan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2020, 2021 dan 2022.....	41
Grafik 3.5 Grafik Perbandingan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase yang terbangun Tahun 2020, 2021 dan 2022.....	48
Grafik 3.6 Grafik Perbandingan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Tahun 2020, 2021 dan 2022.....	50
Grafik 3.7. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2020, 2021 dan 2022.....	53
Grafik 3.8. Perbandingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Tahun 2020, 2021 dan 2022 .....	56
Grafik 3.9. Perbandingan Jumlah Unit Bangunan Gedung Daerah yang Terbangun dalam Kondisi Baik Tahun 2020, 2021 dan 2022.....	61

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar menyusun Laporan Kinerja/LAKIP tahun 2022. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Polewali Mandar dan sumber anggaran APBN tahun anggaran 2022.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Polewali Mandar, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.

Metode penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pengukuran kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 ini menggambarkan indikator kinerja output utama (grand output) atau outcome pada program/ kegiatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2022 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022.

### **A.1 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN**

Pedoman dan aturan-aturan yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, meliputi:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 ;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

- Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten polewali Mandar ;
- Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja;
- Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar ;
- Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 ;

## **A.2. Maksud Dan Tujuan Laporan**

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, serta mempunyai tujuan yaitu sebagai wujud pertanggungjawaban OPD dan untuk mengetahui kemampuan OPD dalam pencapaian tujuan organisasi.

## **B. KEDUDUKAN TUGAS, POKOK DAN FUNGSI**

### **B.1. Kedudukan dan Tugas Pokok**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar sebagai dinas daerah, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pekerjaan umum yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan pemerintah.

## **B. 2. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar mempunyai fungsi :

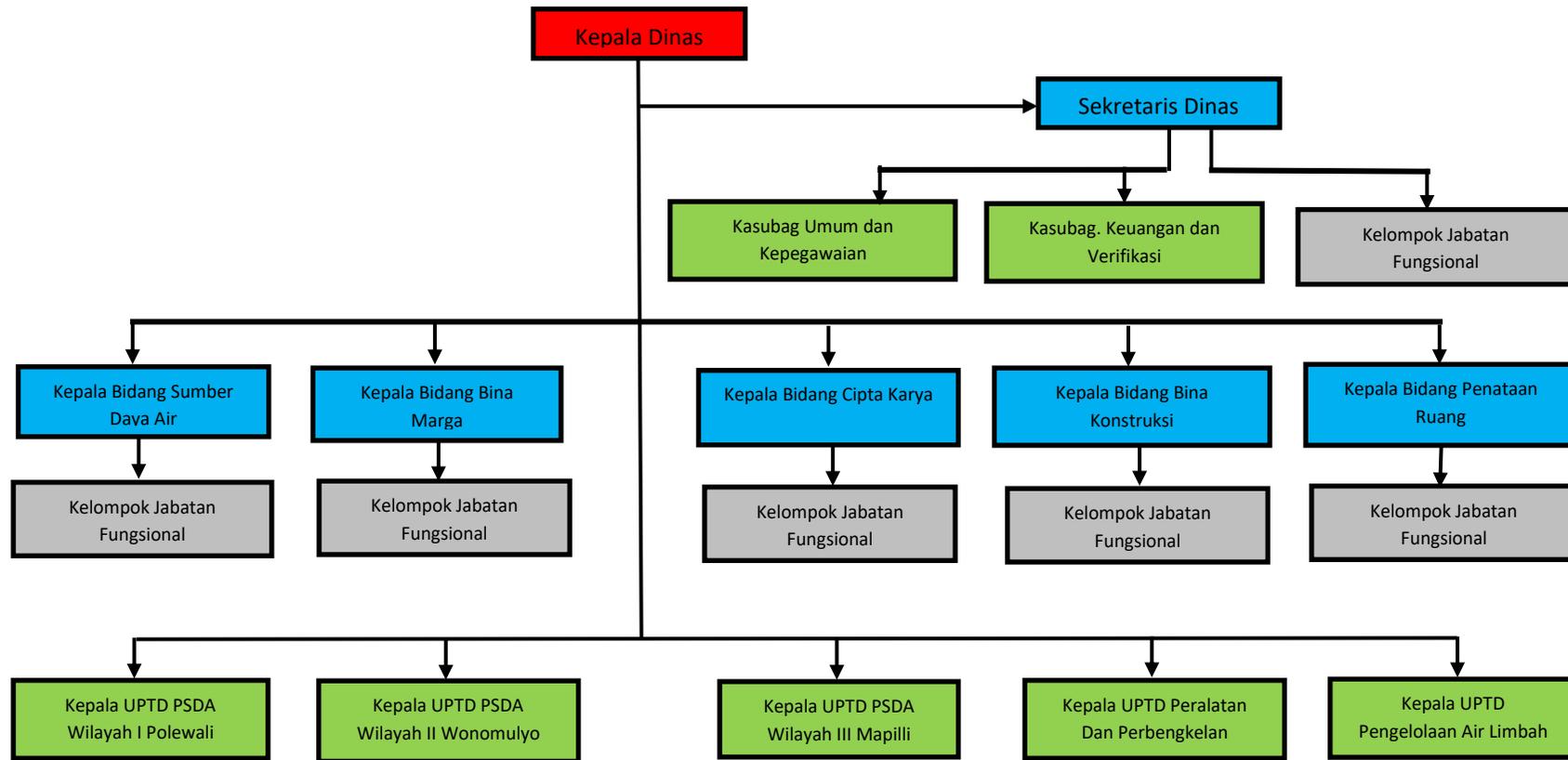
- a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten dibidang pekerjaan umum meliputi sumber daya air, bina marga dan cipta karya
- b. Penyusunan rencana dan program dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang meliputi sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan bina konstruksi;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang meliputi sumber daya air, bina marga dan cipta karya, penataan ruang dan bina konstruksi;
- d. Pelayanan umum dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang meliputi sumber daya air, bina marga dan cipta karya, penataan ruang dan bina konstruksi;
- e. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **B. 3. Susunan Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar, terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Penataan Ruang, UPTD, Jabatan Fungsional secara lengkap Struktur Organisasi sebagai berikut. :

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR



#### **B.4. Gambaran Umum Kondisi Organisasi**

Berdasarkan struktur organisasi Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Susunan Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
  - Kasubag Keuangan dan Verifikasi
  - Kasubag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Sumber Daya Air (SDA)
- d. Bidang Bina Marga
- e. Bidang Cipta Karya
- f. Bidang Bina Konstruksi
- g. Bidang Penataan Ruang
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD )
  - UPTD PSDA Wilayah I Polewali & Kasubag Tata Usaha
  - UPTD PSDA Wilayah II Wonomulyo & Kasubag Tata Usaha
  - UPTD PSDA Wilayah III Mapilli & Kasubag Tata Usaha
  - UPTD UPTD Peralatan Dan Perbengkelan & Kasubag Tata Usaha
  - UPTD UPTD Pengelolaan Air Limbah & Kasubag Tata Usaha
- i. Fungsional

➤ **Kondisi Kepegawaian**

Rasio perimbangan antara formasi dan *bezetting* sampai akhir tahun 2021 belum terpenuhi sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian

No.	Uraian	Eselon	Formasi	Bezetting	( % )
1.	Kepala Dinas	II-B	1	1	100
2.	Sekretaris Dinas	III-A	1	1	100
3.	Kepala Bidang	III-B	5	5	100
4.	Kasubag	IV-A	2	2	100
5.	Kepala UPTD	IV-A	5	4	80
6.	Kasubag Tata Usaha UPTD	IV-B	5	4	80
7.	Fungsional		16	12	75
8.	Staff / Tenaga Lapangan		100	97	28,36
9.	Pegawai Non ASN		265	262	98,87
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>388</b>	<b>97,00</b>

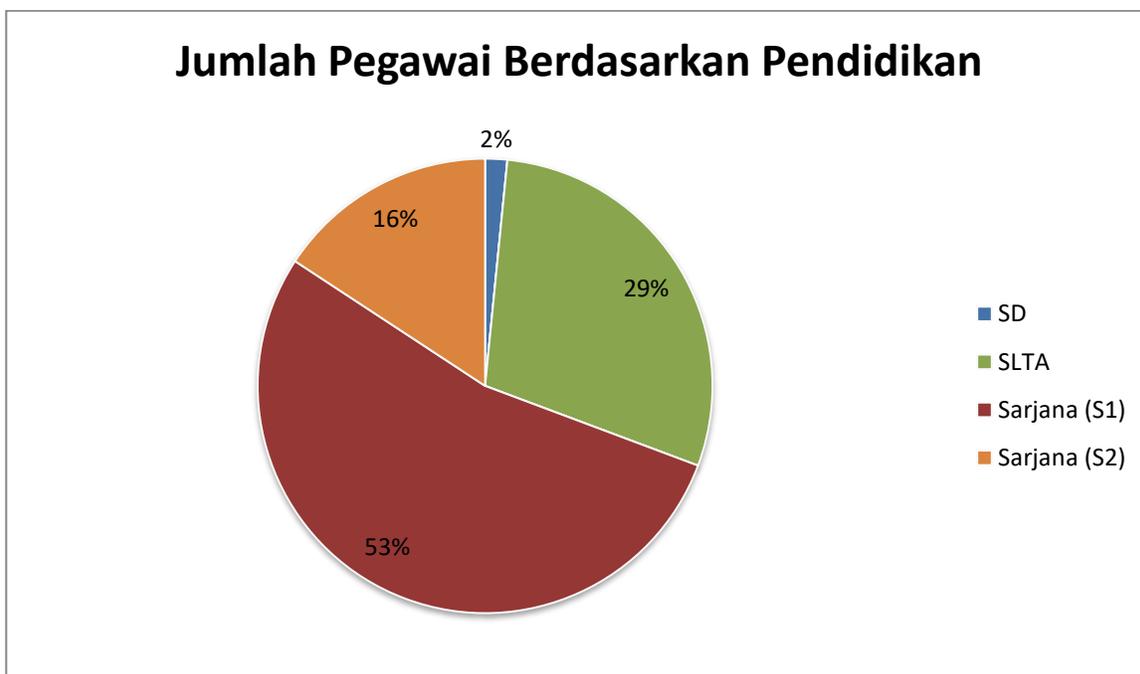
Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat untuk formasinya terisi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan kecuali formasi dilevel Eselon IV-A Kepala UPTD Air Limbah kecuali Eselon IV-B formasinya lowong 1 pada Kasubag Tata Usaha UPTD PSDA Wilayah II. Begitu pun untuk formasi fungsional staf dan pegawai non ASN.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Prosentase
SD	2	0	1,57
SLTA	35	1	29,14
S1-DIV	45	23	53,55
S2-S3	14	6	15,75
<b>Jumlah</b>	<b>96</b>	<b>29</b>	<b>100</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang paling dominan untuk instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah lulusan Sarjana (S1), sebanyak 68 orang atau sebesar 53,55% dari jumlah pegawai dan yang paling sedikit adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2 orang atau sebesar 01,57%.

Grafik: 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

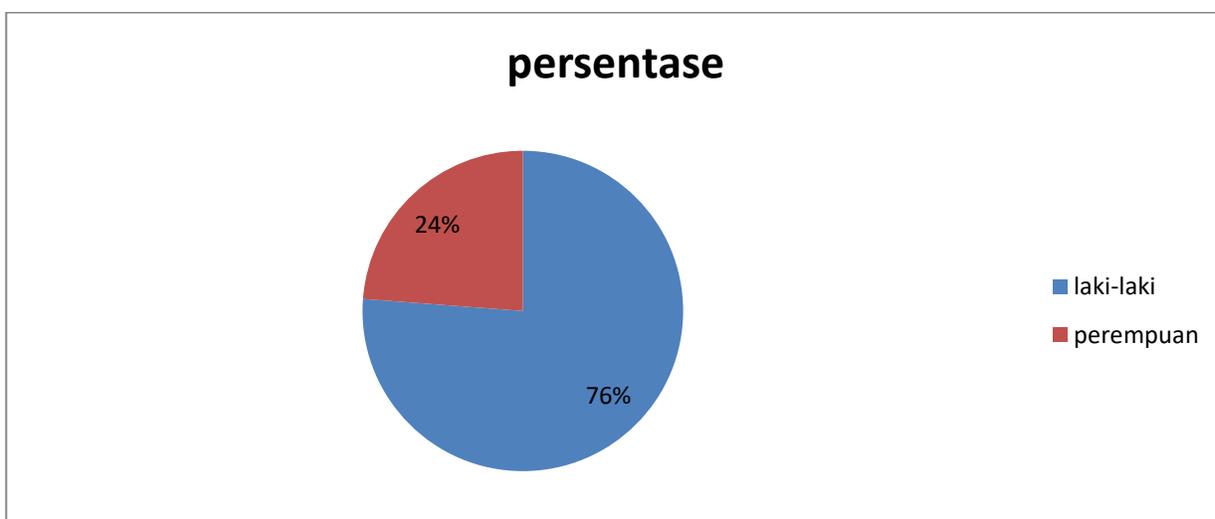


Rendahnya pemahaman dalam bidang teknis dan masih banyaknya pegawai dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang belum memahami teknologi bidang informatika ke PU-an mengakibatkan pekerjaan pelaporan dan pengolahan data masih belum dapat dikerjakan secara maksimal.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah	Persentase
1.	Laki – Laki	96	76,19
2.	Perempuan	30	23,80
.			
Jumlah		126 Orang	

Gambar 1.2 Grafik Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Grafik 1.2 tersebut jumlah pegawai yang ada di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didominasi oleh laki-laki sebesar 76,19%, hal tersebut adalah wajar dikarenakan banyaknya kegiatan fisik di lapangan yang membutuhkan stamina yang prima.

Sedangkan perempuan sebesar 23,80% merupakan pendukung dalam kelancaran proses kegiatan tersebut

➤ **Kondisi Sarana Dan Prasarana Penunjang**

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendukung dan menunjang pencapaian target kinerja antara lain :

- 1 UPTD Workshop dilengkapi dengan alat - alat berat. Alat berat sangat menunjang pelaksanaan kegiatan di lapangan. Ada total 16 unit alat berat yang tersedia di *workshop*, antara lain :

Tabel 1.4 Data Kondis Alat Berat

No	Jenis Alat	Merk	Tahun	Kondisi Alat			Status kepemilikan	Ket
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1	BULDOZER	HITACHI	2003	Baik			Dinas PUPR	
2	MOTOR GREADER	KOMATSU GD 511	2000	Baik			Dinas PUPR	
3	MOTOR GREADER	KOMATSU GD 031	1980			Rusak Berat	Dinas PUPR	
4	EXCAVATOR	CAT 320	2009			Rusak Berat	Dinas PUPR	
5	BOMAG	BOMAG	2007	Baik			Dinas PUPR	
6	BOMAG MINI	BOMAG	1995	Baik			Dinas PUPR	
7	EXCAVATOR	SUMITOMO SH 210	2015		Rusak Ringan		Bantuan Kementerian PUPR	Sementara Dalam Proses Perbaikan
8	EXCAVATOR	SUMITOMO SH 210	2015	Baik			Bantuan Kementerian PUPR	
	BACHO	CASE	2008		Rusak Ringan		Dinas PUPR	Sementara Dalam

*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Polewali Mandar*

9	LOADER							Proses Perbaikan
10	TRONTON	MITSUBHISI 220	2010	Baik			Dinas PUPR	
11	DUMPTRUCK	TOYOTA 130	2009		Rusak Ringan		Dishub diperbantukan di Dinas PUPR	Sementara Dalam Proses Perbaikan
12	DUMPTRUCK	TOYOTA 130	2009		Rusak Ringan		Dishub diperbantukan di Dinas PUPR	Sementara Dalam Proses Perbaikan
13	DUMPTRUCK	TOYOTA 130	2009		Rusak Ringan		Dishub diperbantukan di Dinas PUPR	Sementara Dalam Proses Perbaikan
14	DUMPTRUCK	TOYOTA 130	2009	Baik			Dishub diperbantukan di Dinas PUPR	
15	DUMPTRUCK	TOYOTA 110	2008	Baik			Dishub diperbantukan di Dinas PUPR	
16	DUMPTRUCK	TOYOTA 110	2008	Baik			Dishub diperbantukan di Dinas PUPR	

Gambar 1.2. Alat-alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



2. Laboratorium, berfungsi untuk menguji dan menganalisa bahan material bahan bangunan dan lainnya sebelum digunakan di lapangan ataupun setelah proses pembangunan terlaksana. Ada beberapa alat yang masih dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur antara lain :
- a. Alat uji beton
  - b. Theodolite
  - c. Thermometer aspal
  - d. Alat sondir
  - e. Alat ukur ketebalan aspal

Gambar 1.3 Alat Uji Material pada Laboratorium UPTD *Workshop*



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan tujuan Kabupaten Polewali Mandar yaitu **“Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”**.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 dirancang guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

##### **A.1. VISI**

Visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah **“Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”**. Untuk merealisasikan visi tersebut diperlukan upaya strategik yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal tersebut diperlukan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dicapai dengan baik. Melalui misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019 – 2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius
2. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis ekonomi potensi unggul wilayah

3. Mengembangkan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern.

## **A.2. MISI**

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi dan mengetahui perannya masing masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi/kabupaten.

Didalam merealisasikan Visi dan Misi tersebut telah disusun program- program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2019 – 2024. Terkait misi tersebut diatas yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yaitu pada misi ke tiga dan ke empat.

- **Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas Dan Terintegrasi Serta Berwawasan Lingkungan.**
- **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Modern.**

Program dan kegiatan harus mampu memenuhi capaian tujuan. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

### **Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur**

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air

Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Permukiman

Sasaran 4 : Meningkatkan Kualitas Jasa Konstruksi

Sasaran 5 : Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang

### **Tujuan 2 : Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih akuntabel dan Modern**

Sasaran 6: Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar sebagai instansi teknis yang menangani pembangunan fisik di Kabupaten Polewali Mandar, untuk mewujudkan suatu infrastruktur yang berkualitas yang mampu menjadi faktor pendorong dan menarik (*pull and push factor*) dalam mendukung pembangunan dan pergerakan perekonomian dimasa mendatang, dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi lokal (*local economic development*) yang ada dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk itu di dalam perencanaan dan pembangunan suatu infrastruktur, maka prinsip efisien, efektif, ekonomis, optimal dengan asas pemberdayaan masyarakat melalui jalur penjangkaran aspirasi masyarakat (*bottom up - top down*) senantiasa dikembangkan dan diterapkan dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan.

### **A.3. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Setelah menentukan tujuan strategis, maka selanjutnya tentu harus dirumuskan sasaran strategis yang ingin dicapai sebagai wujud dari proses perencanaan strategis. Tujuan utama dalam penentuan sasaran adalah bagaimana mewujudkan suatu infrastruktur yang berkualitas, yang mampu memberikan nilai tambah dalam pemanfaatannya dengan menggunakan sumber daya pembiayaan dan sumber daya organisasi secara efisien, efektif dan berhasil guna.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar adalah :

**Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur**

**Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan**

Program : Penyelenggaraan Jalan

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

**Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air**

Program : Penegelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman**

Program : Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air  
Limbah

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem  
Drainase

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Program Penataan Bangunan Gedung

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

- Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

**Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Jasa Kontruksi**

Program : Pengembangan Jasa Konstruksi

- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

- Sasaran 5 : Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang**  
Program : Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Sasaran 6 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah**  
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## **B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022**

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Polewali Mandar tahun 2022. Dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2022 tersebut diuraikan sasaran-sasaran, indikator kinerja, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran, pada Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan penjabaran dari sasaran dan

indikator sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Polewali Mandar TA. 2022

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan	Indeks Infrastruktur Kebinamargaan	77,77%
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air	80,91%
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciptakarya	Indeks Infrastruktur Keciptakarya	85,04%
4	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	Indeks Kepuasan Layanan Jasa Konstruksi	Baik
5	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya	50,00%
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB
		Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	71,88%
		Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Sangat Baik

Tabel 2.2: Program dan Anggaran Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

<b>No</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 3.976.884.593	APBN/ APBD
2	Penyelenggaraan Jalan	Rp. 30.638.928.500	APBN/APBD
3	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 1.000.000.000	APBD
4	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 11.788.212.600	APBN/APBD
5	Pengelolaan Dan	Rp. 5.409.678.500	

	Pengembangan Sistem Air Limbah		APBN/APBD
6	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 818.785.975	APBD
7	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp. 616.456.600	APBD
8	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp. 26.774.367.940	APBD
9	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 768.336.600	APBD
10	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 801.834.400	APBD
11	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.704.132.388	APBD

Perjanjian Kinerja mengalami perubahan anggaran. Dibawah ini kami lampirkan anggaran setelah perubahan.

Tabel : 2.3 Program dan Anggaran Kegiatan Setelah Perubahan

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 4.756.487.118	APBN/APBD
2	Penyelenggaraan Jalan	Rp. 35.281.399.925	APBN/APBD
3	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. 2.513.151.500	APBD
4	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 12.479.271.800	APBN/APBD
5	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 4.007.819.500	APBN/APBD

6	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 1.477.894.590	APBD
7	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp. 616.456.600	APBD
8	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp. 27.619.760.970	APBD
9	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 768,336,600	APBD
10	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 886,434,100	APBD
11	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.849.911.389	APBD

Tabel 2.4 Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Polewali Mandar TA. 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	Meter	7700	337
		Jumlah Bendung yang Direhabilitasi	Unit	1	3
		Jumlah Unit Pengadaan Bronjong	Unit	1000	1000
		Panjang sungai yang dinormalisasi	Meter	7000	4515
		Jumlah Bendung irigasi yang dikelola	Bendung	42	43
		Jumlah Daerah Irigasi yang terkendali	Daerah Irigasi	41	43
		Jumlah galian sedimen bendung dan jaringan irigasi	M <sup>3</sup>	3498	3424,29
		Jumlah Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelola Sumber Daya Air (UPTD PSDA)	UPTD	3	3

2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan	Panjang jalan kabupaten yang di tingkatkan	KM	5,84	6,33
		Panjang jalan kabupaten yang terpelihara	KM	8,02	8,06
		Jumlah Jembatan yang dibangun dan direhab	Unit	2	4
		Panjang jalan Kabupaten yang di inspeksi	KM	94	94
		Jumlah jembatan yang di inspeksi	Unit	53	53
		Jumlah Alat Berat yang dipelihara	Unit	7	4
3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciptakarya	Jumlah Jiwa penerima manfaat air minum	Jumlah Jiwa	8390	9005
		Jumlah rumah tangga berakses sanitasi yang layak	Jumlah RT	500	141
		Panjang drainase yang terbangun	Meter	493	1043
		Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Perkotaan Yang Ditingkatkan	Meter	587	611
		Jumlah Unit TPS3R yang dibangun	Unit	1	3
		Jumlah Unit Bangunan Gedung Daerah yang Terbangun	Unit	5	5
4	Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Orang	50	24
		Jumlah Perusahaan Jasa Konstruksi yang diawasi	Perusahaan	50	50
		Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jenis	10	7
5	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen RRTR	Dokumen	1	1
		Jumlah Laporan / Orang Sosialisasi	Orang	1000	1000
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persen	50	50
6	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	1	1
		Jumlah Rencana Kerja	Dokumen	4	4

Pemerintahan Perangkat Daerah	Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu			
	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Dokumen	1	1
	Jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	Dokumen	1	1
	Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan	Orang	129	129
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	Dokumen	1	1
	Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu	Dokumen	1	1
	Jumlah pegawai yang menyelesaikan pelatihan	Pegawai	3	0
	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia	Jenis	6	6
	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia	Jenis	24	24
	Jumlah Jenis Alat -Alat Rumah Tangga yang Tersedia	Jenis	15	15
	Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia	Paket	700	700
	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia	Jenis	4	4
	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis	2	0
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Dokumen	55	55
	Jumlah Unit mebeleur	Paket	3	3
	Jumlah Jenis Alat Kantor	Paket	5	5
	Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola	Surat	1729	1896

		Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi	m <sup>2</sup>	1700	1700
		Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	m <sup>2</sup>	17800	17800
		Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara	Unit	25	25

Melihat tabel di atas realisasi indikator sub kegiatan ada yang mencapai target bahkan ada yang melampaui dari target namun ada juga yang tidak mencapai target.

➤ Indikator sub kegiatan yang tidak mencapai target yaitu diantaranya:

1. Panjang jaringan irigasi yang di rehabilitasi
2. Panjang sungai yang dinormalisasi
3. Jumlah galian sedimen bendung dan jaringan irigasi
4. Jumlah alat berat yang dipelihara
5. Jumlah rumah tangga berakses sanitasi yang layak
6. Jumlah peserta pelatihan tenaga terampil konstruksi
7. Jumlah sistem informasi jasa konstruksi.

Banyaknya sub kegiatan yang tidak mencapai target disebabkan terbatasnya anggaran yang tersedia. Agar kedepannya lebih berhati-hati dalam menentukan proyeksi target agar dapat memenuhi pencapaian sasaran yang telah ditentukan berdasarkan anggaran yang disediakan.

➤ Indikator sub kegiatan yang melampaui dari target adalah:

1. Panjang jalan kabupaten yang di tingkatkan
2. Panjang jalan kabupaten yang dipelihara
3. Jumlah jembatan yang dibangun dan direhabilitasi
4. Jumlah jiwa penerima manfaat air minum
5. Panjang drainase yang terbangun
6. Panjang jalan lingkungan kawasan perkotaan yang ditingkatkan
7. Jumlah unit TPS3R yang dibangun.

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN**

### **A. AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan organisasi kepada pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Program/Kegiatan dimasa yang akan datang.

#### **➤ TUJUAN MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR**

#### **A.1. MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR KEBINAMARGAAN**

##### **A.1.1 Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Mantap**

Salah satu faktor keberhasilan pemerintah kabupaten Polewali Mandar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya adalah dengan melalui penyediaan fasilitas atau infrastruktur yang memadai diantaranya adalah menyediakan akses jalan dan jembatan sebagai mobilitas masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar Rp.35.281.399.925,- Anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp.18.415.761.925,- dan Anggaran APBN Rp.16.865.638.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.25.129.935.705,- 71,22%.

### A.1.1.1 Panjang Jalan Kabupaten Yang Terbangun

Kegiatan Pembangunan Jalan sasaran utamanya adalah meningkatkan *aksesibilitas* dan *interkoneksi* antar wilayah, dengan meningkatkan kondisi jaringan jalan dari jalan tanah menjadi jalan sudah diperkeras, serta membuka kawasan terisolasi dengan melakukan perintisan jalan menuju kawasan potensial untuk dikembangkan. Pada kegiatan Pembangunan Jalan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 11,677,473,800,- Anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp.2.973.332.800,- dan Anggaran APBN Rp. 8.704.141.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.9.820.542.890,- 84,09%.

Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menargetkan Pembangunan Jalan Kabupaten 5,84 Km yang terealisasi sepanjang 6,3 KM,. Adapun kegiatan Pembangunan Jalan dan adalah :

Tabel 3.1 Panjang Jalan kabupaten Yang Terbangun

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Peningkatan Jl. Ruas Gatot Subroto/Jl. Kesadaran Wonomulyo	573 M	Rp. 970.093.000	DAU
2	Peningkatan Jalan Ruas Galung Lombok - Renggeang	760 M	Rp. 1.490.115.000	DAU
3	Peningkatan Kapasitas Strktur Jalan Ruas Lampoko -Pangesoran	5.001 M	Rp. 8.280.000.000	DAK

Gambar 3.1 Peningkatan Jalan Ruas Lampoko - Pengesoran



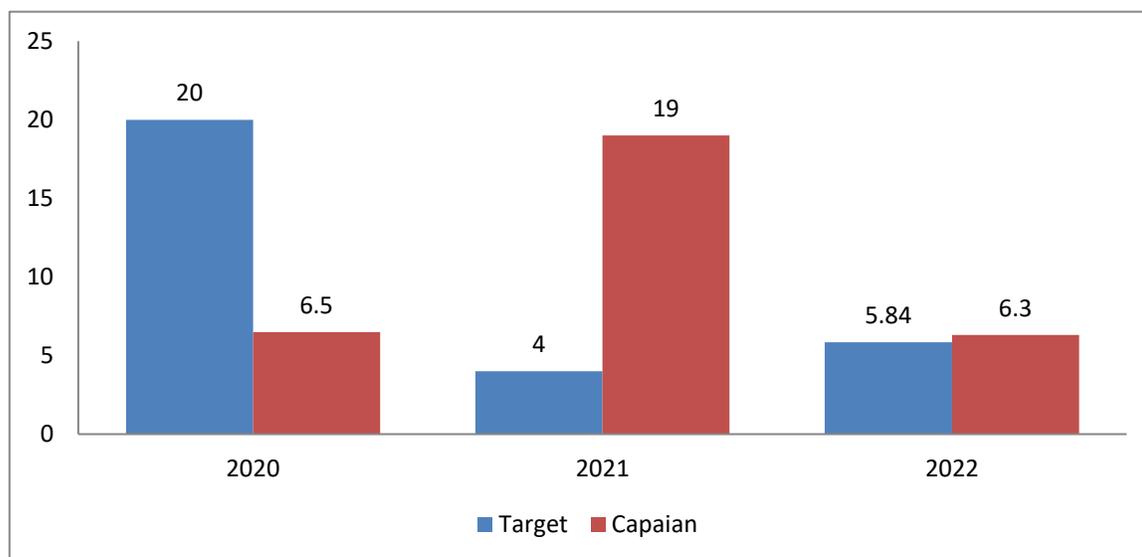
Kondisi 0%

Progres 100%

Tabel: 3.2. Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten yang terbangun Tahun 2020, 2021 dan 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Panjang jalan kabupaten yang terbangun	20 Km	6,5 Km	4 Km	19 Km	5,84 Km	6,3 Km

Grafik 3.1. Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten Yang Terbangun Tahun 2020, 2021 dan 2022



Grafik diatas menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan jalan melampaui dari target.

#### **A.1.1.2 Panjang Jalan Kabupaten Yang Direhabilitasi**

Pada kegiatan Rehabilitasi Jalan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 19,659,310,875,- Anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp.11.497.813.875,- dan Anggaran APBN Rp. 8.161.497.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.13.529.986.185,- 69%.

Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menargetkan Panjang Jalan Kabupaten yang di Rehabilitasi 8,02 Km yang terealisasi sepanjang 8,06 Km,. Adapun kegiatan Pembangunan Jalan dan adalah :

**Tabel 3.3 Panjang Jalan Kabupaten Yang Direhabilitasi**

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume Meter	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Jalan akses Markas Brimob	350	Rp. 703.166.000	DAU
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Ruas Botto – Katumbangan (Lanjutan Aspal)	800	Rp. 1.490.450.000	DAU
3	Peningkatan Jalan Dalam Kota Polewali	1.361	Rp. 2.990.281.000	DAU
4	Peningkatan Jalan Kompleks Rea Barat Desa Patampanua	533	Rp. 1.000.000.000	DAU
5	Peningkatan Jalan Ruas Jl. Darma - Sulewatang	275	Rp. 340.328.500	DAU
6	Peningkatan Jalan Ruas Talolo - Tammajarra	260	Rp. 497.170.000	DAU
7	Rehabilitasi Jalan Ruas Parappe-Sengkae	580	Rp. 823.132.000	DAU
8	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Padangmawalle – Patulang	2.620	Rp. 5.240.000.000	DAK
9	Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ruas Sumarrang - Puambuttu	1300	Rp. 2.560.000.000	DAK

Gambar 3.2 Pemeliharaan Jalan Ruas Padangmawalle-Patulang



Kondisi 0%

Progres 100%

Tabel: 3.4. Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten yang Direhabilitasi Tahun 2020, 2021 dan 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi	20 Km	6,5 Km	4 Km	19 Km	8,02 Km	8,07 Km

Grafik 3.2. Perbandingan Panjang Jalan Kabupaten yang Direhabilitasi Tahun 2020, 2021 dan 2022



Grafik diatas menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi jalan mencapai target.

➤ **Pemeliharaan Rutin Jalan**

Ditahun 2022 sub kegiatan pemeliharaan rutin jalan terdapat dua indikator yaitu, jumlah ruas jalan yang di pelihara dan jumlah alat berat yang dipelihara dengan target 7 unit alat berat yang dipelihara namun karena keterbatasan anggaran hanya 4 unit saja yang dapat dipelihara tahun ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 139.800.000,-.

Tabel 3.5. Pemeliharaan Rutin Jalan 13 Ruas :

No	Uraian	Lokasi	Sumber Dana
1	Pemeliharaan Jalan Ruas Gatot Subroto	Kec. Polewali	DAU
2	Pemeliharaan Jalan Ruas Jl. Andi Tomming	Kec. Polewali	DAU
3	Pemeliharaan Jalan Ruas Jl. Pemuda	Kec. Polewali	DAU
4	Pemeliharaan Jalan Ruas Jl. Kapten Jumhana	Kec. Wonomulyo	DAU
5	Pemeliharaan Jalan Ruas Jl. Tapango Pelitakan	Kec. Tapango	DAU
6	Pemeliharaan Jalan Ruas Jl. Mapilli – Piriang	Kec. Tapango	DAU
7	Pemeliharaan Jalan Ruas Jl. Pokko – Kunyi	Kec. Anreapi	DAU
8	Pemeliharaan Jalan Ruas Jl. Darma – Sulewatang	Kec. Polewali	DAU
9	Pemeliharaan Jalan Ruas Jl. Cendrawasih	Kec. Polewali	DAU
10	Pemeliharaan Jalan Ruas Jl. Kompleks Stadion	Kec. Polewali	DAU
11	Pemeliharaan Jalan Ruas Jl. Ihing – Lenggo	Kec. Bulu	DAU
12	Pemeliharaan Jalan Terminal Wonomulyo	Kec. Wonomulyo	DAU
13	Pemeliharaan Jalan Ruas Jl. Pendidikan Tinambung	Kec. Tinambung	DAU

### A.1.1.3 Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik

Jembatan merupakan akses penghubung yang menghubungkan wilayah yang terpisahkan oleh aliran sungai sehingga *interkoneksitas* antar wilayah dan kawasan akan semakin lancar yang pada akhirnya akan memperlancar perputaran roda perekonomian masyarakat. Pada tahun 2022 ditargetkan Pembangunan 2 (Dua) Unit Jembatan dan terealisasi 4 (Empat) unit.

Tabel: 3.6 Kegiatan Pembangunan/Penggantian Jembatan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Pembangunan Jembatan Sungai Sanrego Paket 1	10 meter	Rp. 905.930.000	DAU
2	Pembangunan Jembatan Sungai Sanrego Paket 2	14 meter	Rp. 1.433.965.000	DAU
3	Penggantian Jembatan Ruas Matakali – Pelitakang	5 meter	Rp. 149,919,000	DAU
4	Penggantian Jembatan Dsn Pallis Desa Batupanga	4 meter	Rp. 100,000,000	DAU

Gambar 3.3. Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Jembatan Sanrego II Kecamatan Luyo.



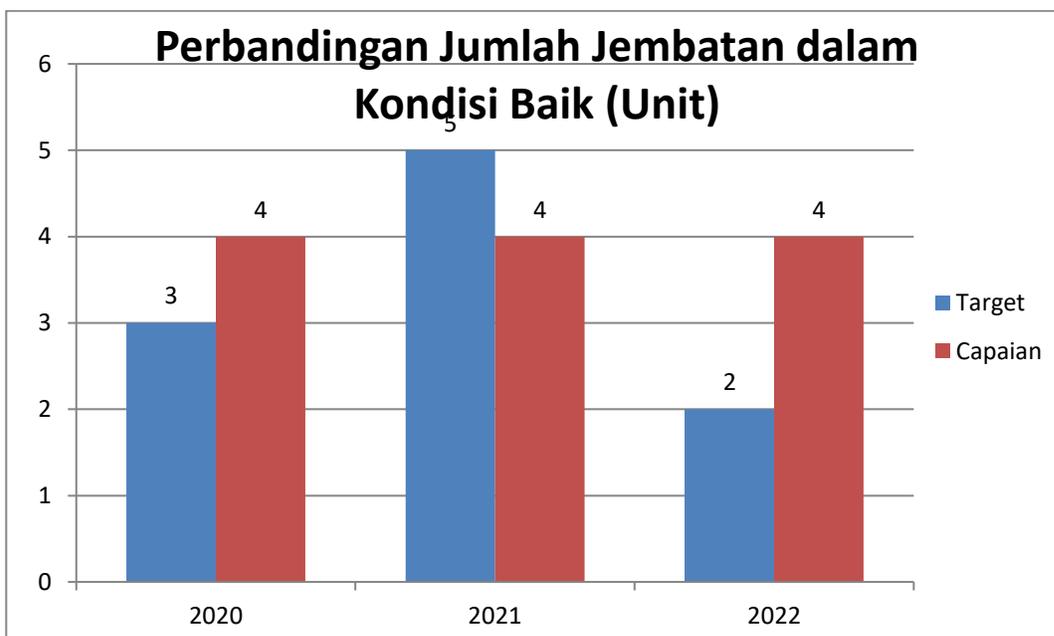
Kondisi 0%

Progres 100%

Tabel 3.7. Perbandingan Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2020, 2021 dan 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Jumlah jembatan dalam kondisi baik	3	4	5	4	2	4

Grafik 3.3 Perbandingan Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2020, 2021 dan 2022



Grafik diatas menunjukkan bahwa target Jembatan dalam kondisi baik di tahun 2022 melampaui target.

**Tabel : 3.8 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan**

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Analisa Capaian Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan Gagal/Berhasil</b>
<b>Program</b>				
Penyelenggaraan Jalan				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap</li> </ul>	75,16%	71,20%	94,73%	Realisasi Indikator Program (71,20%) lebih kecil dari target (75,16). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (94,73%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil". Dana yang disediakan tidak cukup untuk mencapai target
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik</li> </ul>	80,38%	67,03	83,39%	Realisasi Indikator Program (67,03%) lebih kecil dari target (80,38%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (83,39%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil". Dana yang disediakan tidak cukup untuk mencapai target
<b>Kegiatan</b>				
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap, Sedang, Baik</li> </ul>	75.16%	71,20%	94,73%	Realisasi Indikator kegiatan (71,20%) lebih kecil dari target (75,16%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (94,73%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil". Dana yang disediakan tidak cukup untuk mencapai target
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik</li> </ul>	80.38%	67,03%	83,39%	Realisasi Indikator kegiatan (76,03%) lebih kecil dari target (80,38%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (83,39%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil". Dana yang disediakan tidak cukup untuk mencapai target

<p><b>Sub Kegiatan</b> Pembangunan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Panjang jalan kabupaten yang terbangun</li> </ul>	5,84 Km	6,33 Km	1,083%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (6,33 Km) lebih besar dari target (5,84 Km). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (1,083%). Indikator Kinerja % masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
<p><b>Sub Kegiatan</b> Rehabilitasi Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Panjang jalan kabupaten yang rehabilitasi</li> </ul>	8,02 Km	8,06 Km	1,049%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (8,06 Km) lebih besar dari target (8,02 Km). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (1,049%). Indikator Kinerja % masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
<p><b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan Rutin Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Alat Berat yang dipelihara</li> </ul>	7 Unit	4 Unit	57,14%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (4 Unit) lebih kecil dari target (7 Unit). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (57,14%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil". Dana yang disediakan tidak cukup untuk mencapai target.
<p><b>Sub Kegiatan</b> Pembangunan Jembatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Jembatan Kabupaten yang Terbangun</li> </ul>	2 Unit	4 Unit	200%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (4 Unit) lebih besar dari target (2 Unit). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (200%). Indikator Kinerja % masuk pada kategori "Sangat Berhasil".

➤ Permasalahan antara lain :

1. Perlunya peningkatan kualitas jalan pada beberapa titik.
2. Tingkat kerusakan jalan lebih besar dibandingkan perbaikan/pemeliharaan jalan
3. Data dasar kondisi infrastruktur jalan belum akurat
4. Anggaran pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan jalan terbatas
5. Pembebasan lahan untuk pembangunan/perintisan jalan masih terkendala

- Solusi yang dapat di tempuh agar beberapa permasalahan tersebut dapat diatasi antara lain :
  1. Penanganan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan peningkatan kapasitas/ kualitas jalan dan pembangunan/ penggantian jalan sesuai dengan prioritas dan anggaran yang tersedia
  2. Update data/ inventarisasi kondisi jalan
  3. Penambahan anggaran dalam penanganan infrastruktur jalan dan jembatan
  4. Berkoordinasi dengan instansi/ pihak yang terkait dengan pembebasan lahan.

## **A.2. MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**

Penyediaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk memelihara sumber-sumber air, jaringan irigasi, pembangunan/ pemeliharaan turap/talud/bronjong dan mengurangi kerusakan-kerusakan. Untuk mencapai indikator sasaran ini maka program yang dirancang yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan ada dua kegiatan pada program ini yakni :

1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, mengalokasikan anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp. 1.935.433.750,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.442.817.400,- 74,54%.
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.821.053.368,., Anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp. 1.817.728.368,- dan Anggaran APBN Rp.1.003.325.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.130.535.257,- 75,52%.

### **A.2.1. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi jaringan irigasi teknis dan semi teknis yang ada agar dapat berfungsi secara maksimal dalam menyuplay kebutuhan air akan tanaman sehingga pola tanam dapat diatur

dengan baik dan tanaman dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan produksi yang lebih baik.

Di tahun 2022 Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di targetkan 81.67%, dengan ralisasi sebesar 64,66%. Jumlah DI (Daerah Irigasi) yang tersedia sebanyak 41 Daerah Irigasi dengan panjang saluran irigasi yang direhab pada tahun 2022 340 meter yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar.

#### **A.2.1.1. Panjang Sungai Yang Dipelihara**

Sub Kegiatan Normalisasi /Restorasi Sungai, output kegiatan ini Panjang Sungai Yang Dipelihara dengan menargetkan 7000 Meter namun dengan keterbatasan anggaran realisasi tidak mencapai hanya sebesar 4550 Meter. Adapun kegiatan Normalisasi /Restorasi Sungai antara lain:

Tabel 3.9 Sub Kegiatan Normalisasi /Restorasi Sungai

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Normalisasi Saluran Pembuang Desa Patampanua Kecamatan Matakali	1 Paket	Rp. 150.289.800	DAU
2	Normalisasi Sungai Katumbangan - Buku Kec. Campalagian	1 Paket	Rp. 196.101.700	DAU

Gambar 3.4. Normalisasi /Restorasi Sungai Landi Kanusuang



Progres 0% (MC 0)

Progres 100%

#### A.2.1.1. Panjang Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi

Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, output kegiatan ini Panjang Saluran Irigasi Yang Telah Direhabilitasi dengan menargetkan 7700 Meter namun dengan keterbatasan anggaran realisasi tidak mencapai hanya sebesar 340 Meter. Adapun kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan antara lain:

Tabel 3.10 Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Passembarang	1 Paket	Rp. 200.000.800	DAU
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Alapahang	1 Paket	Rp. 953.325.000	DAK

Gambar 3.5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I Alapahang Desa Riso



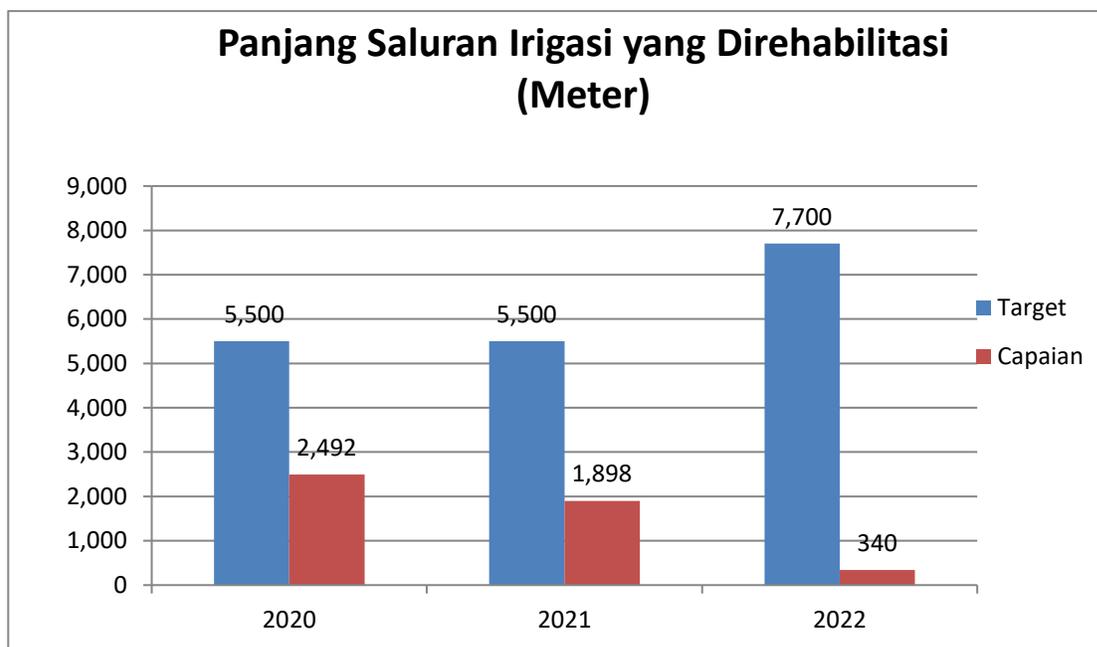
Progres 0% (MC 0)

Progres 100%

Tabel 3.11 Perbandingan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2020, 2021 dan 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan Irigasi	Panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	5.500 meter	2.492 meter	5.500 meter	1.898 meter	7.700 meter	340 meter

Grafik 3.4 Perbandingan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Tahun 2020, 2021 dan 2022



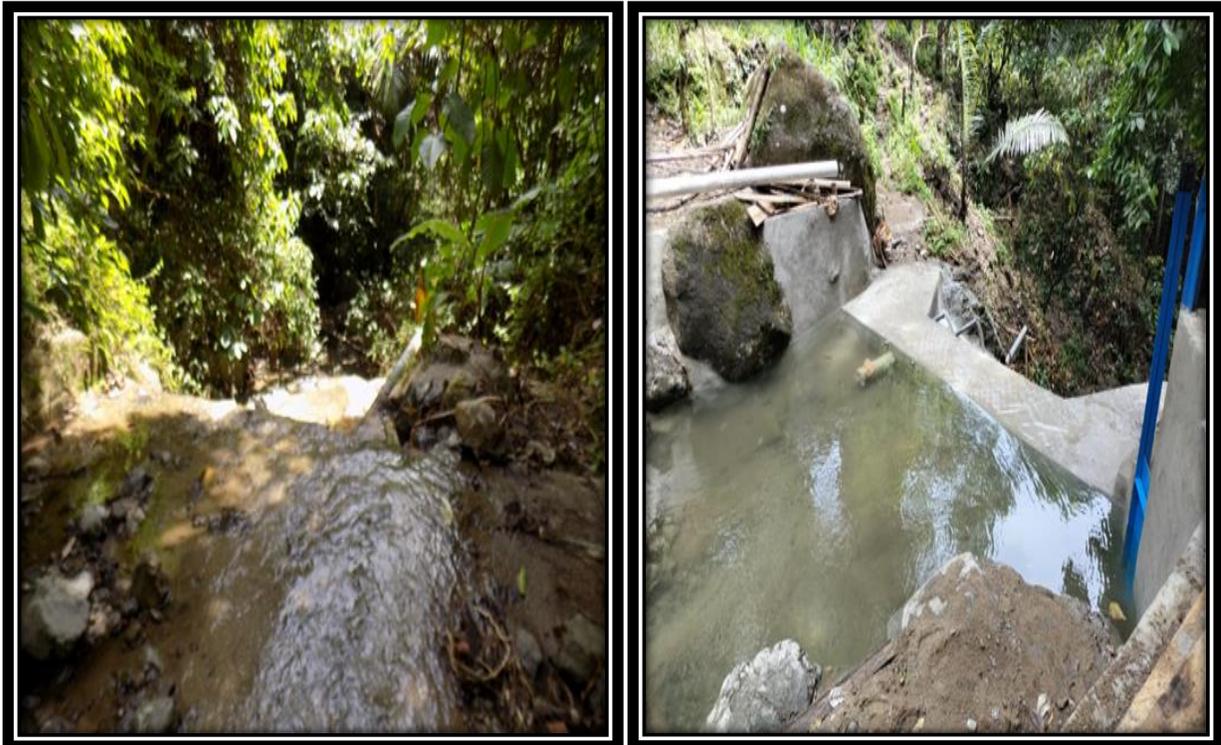
#### A.2.1.1. Jumlah Bendung Yang Telah Ditingkatkan

Sub kegiatan Peningkatan Bendung Irigasi ini fokus pada Pembangunan/pemeliharaan bendung irigasi. Adapun kegiatan Peningkatan Bendung Irigasi adalah :

Tabel 3.12 Kegiatan Peningkatan Bendung Irigasi

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Peningkatan Bendung D.I. Rattenalu	1 paket	Rp 100,000,000	DAU

Gambar 3.6 Peningkatan Bendung Irigasi Rattenallu



Progres 0% (MC 0)

Progres 100%

- Permasalahan antara lain :
  1. Rendahnya anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan / pemeliharaan jaringan irigasi
  2. Tingkat kerusakan pada jaringan irigasi lebih besar dibandingkan perbaikan/pemeliharaan, di sebabkan beberapa faktor seperti bencana longsor
  3. Tingginya target pada awal penyusunan Renja
  4. Lemahnya pengawasan terhadap penegakan perda irigasi
  
- Solusi yang dapat di tempuh agar permasalahan tersebut dapat diatasi antara lain :
  1. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk membiayai pemeliharaan jaringan irigasi.

2. Pada saat pengurangan anggaran kegiatan seharusnya penentuan target di turunkan juga
3. Meningkatkan frekuensi pengawasan terhadap penegakan perda pengairan dan polisi pengairan

**Tabel: 3.13 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air**

<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Analisa Capaian Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan Gagal/Berhasil</b>
<p><b>Program</b> Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik</li> </ul>	81,67%	64,66%	79,17%	Realisasi Indikator Program (64,66%) lebih kecil dari target (81,67%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (79,17%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil". Dana yang disediakan tidak cukup untuk mencapai target
<p><b>Kegiatan</b> Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Bendung Dalam Kondisi Baik</li> </ul>	82%	45,45%	55,42%	Realisasi Indikator Kegiatan (45,45%) lebih kecil dari target (82%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (55,42%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil". Dana yang disediakan tidak cukup untuk mencapai target
<p><b>Sub Kegiatan</b> Normalisasi/Restorasi Sungai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panjang Sungai Yang Dipelihara</li> </ul>	7000 Meter	4515 meter	65%	Realisasi Indikator Sub Kegiatan (4515 meter) lebih kecil dari target (7000 meter). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (65%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil". Dana yang disediakan tidak cukup

<p><b>Kegiatan</b> Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pintu Air Irigasi Dalam Kondisi Baik</li> </ul> <p><b>Sub Kegiatan</b> Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panjang Saluran Irigasi Yang Telah Direhabilitasi</li> </ul> <p><b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Bendung Irigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Bendung yang direhabilitasi</li> </ul>	<p style="text-align: center;">81,67%</p> <p style="text-align: center;">7700 meter</p> <p style="text-align: center;">1 unit</p>	<p style="text-align: center;">84,15%</p> <p style="text-align: center;">337 meter</p> <p style="text-align: center;">1 unit</p>	<p style="text-align: center;">103%</p> <p style="text-align: center;">43,767%</p> <p style="text-align: center;">100%</p>	<p>untuk mencapai target.</p> <p>Realisasi Indikator Program (84,15%) lebih kecil dari target (81,67%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (103%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".</p> <p>Realisasi Indikator Sub Kegiatan (337 meter) lebih kecil dari target (7700 meter). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (43,76%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil". Dana yang disediakan tidak cukup untuk mencapai target</p> <p>Realisasi Indikator Sub Kegiatan (1unit ) sama dengan target (1 unit). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".</p>
--	---	--	--	--

### **A.3. MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN**

Salah satu faktor dalam peningkatan kualitas permukiman di Kabupaten Polewali Mandar adalah penyediaan fasilitas air bersih, pembangunan sanitasi, saluran drainase serta pembangunan jalan lingkungan. Masih banyaknya warga masyarakat yang belum menikmati fasilitas air bersih serta untuk mendukung program *Sustainable Development Goal* (SDGs) yaitu pada tahun ini diharapkan mengurangi jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang sehat. Hal tersebut sangat penting dan mendasar sehingga program dan kegiatan untuk peningkatan kualitas permukiman setiap tahun dianggarkan. Ada beberapa OPD yang terlibat dalam peningkatan kualitas permukiman ini yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### **A.3.1. Persentase Drainase Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik**

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase yang mendukung sasaran Meningkatnya kualitas drainase kawasan perkotaan, dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu Persentase Drainase Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik dengan realisasi sebesar 90,24%. Kegiatan yang mendukung pencapaian dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung sasaran Meningkatnya panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air, dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air dengan realisasi sebesar 373,62 km.

##### **A.3.1.1 Panjang Drainase Yang Terbangun**

Salah satu faktor keberhasilan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya terutama masyarakat pedalaman adalah dengan melalui penyediaan fasilitas atau infrastruktur yang memadai diantaranya adalah menyediakan pembangunan drainase sebagai mobilitas masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam

Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp.4.363.074.700,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.3.952.817.260,- 90,59%.

Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase perkotaan tahun ini terdapat 14 titik lokasi pada 5 kecamatan diantaranya adalah :

Tabel 3.14 Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase perkotaan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Pembangunan Drainase Lingkungan BTN Stadion Kel. Madatte	278 meter	Rp. 172.721.000	DAU
2	Pembangunan Drainase Linomaloga Kec.Polewali	165 meter	Rp. 114.026.000	DAU
3	Pembangunan Drainase Lingkungan Belawa	100 meter	Rp. 85.084.000	DAU
4	Pembangunan Drainase Jalan Kartini	1.150 meter	Rp. 1.264.518.000	DAU
5	Pembangunan Drainase Jalan Pusat Pelatihan Pramuka dan PMR Kel. Darma	104 meter	Rp. 103.740.000	DAU
6	Pembangunan Drainase Jalan Terong Kel.Wattang Kec. Polewali	25 meter	Rp. 138.211.000	DAU
7	Rehab Saluran Drainase Alun-alun Polewali	260 meter	Rp. 177.445.000	DAU
8	Pembangunan Drainase Desa Sumberjo	290 meter	Rp. 165.788.000	DAU
9	Pembangunan Drainase Desa Sugiwaras Kec. Wonomulyo	280 meter	Rp. 176.299.000	DAU
10	Pembangunan Drainase Kec. Matakali	260 meter	Rp. 150.244.000	DAU
11	Pembangunan Drainase Kel. Mapilli Kec. Mapilli	237 meter	Rp. 176.214.000	DAU

12	Pembuatan Drainase Kel. Pappang Kec. Campalagian	273,5 meter	Rp. 165.886.000	DAU
13	Pembangunan Drainase Kel. Mapilli Kec. Mapilli	276 meter	Rp. 165.690.000	DAU
14	Pembangunan Drainase Lingkungan Kel. Matakali Kec. Matakali	160,7 meter	Rp. 264.048.000	DAU

Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Drainase Pasar Tinambung



Progres 0% (MC 0)

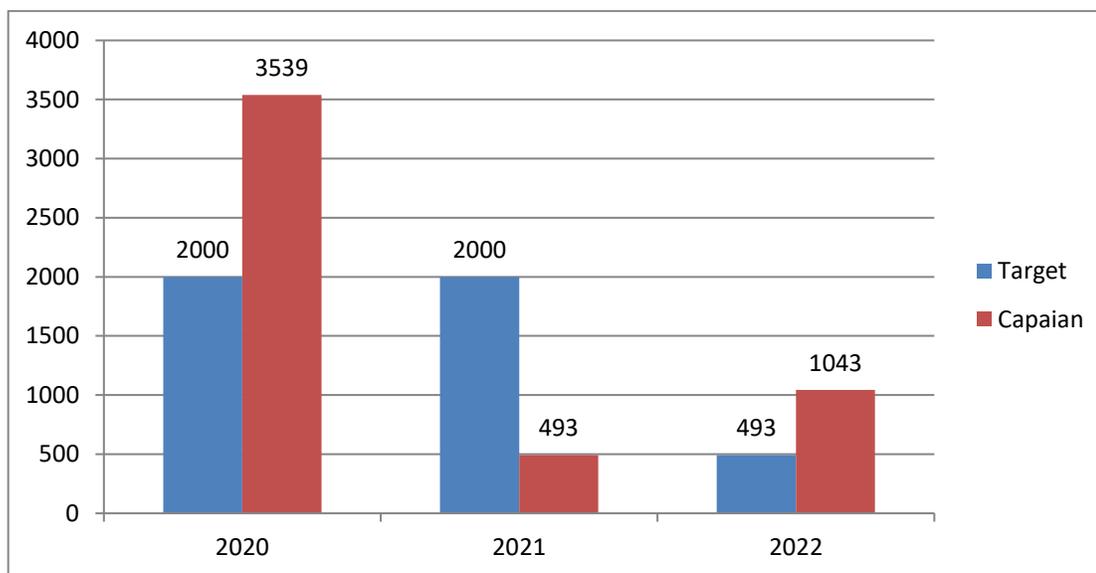
Progres 100%

Tabel 3.15 Perbandingan Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase perkotaan  
Tahun 2020, 2021 dan 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciptakaryaannya	Panjang drainase yang terbangun	2000	3539	2000	493	493	1043

Tabel diatas menunjukkan bahwa melampaui dari target.

Grafik 3.5 Grafik Perbandingan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase yang terbangun Tahun 2020, 2021 dan 2022



Dalam pelaksanaannya kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong memiliki beberapa permasalahan antara lain :

1. Permasalahan sampah yang menyumbat aliran drainase
2. Pembuangan saluran air di bawah trotoar tidak berfungsi dengan baik.

Dari permasalahan tersebut ada solusi yang dapat di tempuh agar permasalahan tersebut dapat diatasi antara lain :

1. Butuh kesadaran semua pihak untuk memelihara lingkungan khususnya drainase.
2. Perlu penanganan terhadap saluran pembuang di bawah trotoar.

### **A.3.2. Persentase Jalan Lingkungan Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik**

#### **A.3.2.1 Panjang Jalan Lingkungan Kawasan Perkotaan Yang Ditingkatkan**

Tahun 2022 Pembangunan Jalan Lingkungan terdapat di kecamatan Polewali dan kecamatan Campalagian. Pada kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp.

616.456.600,-Realisasi anggaran sebesar Rp. 584,497,500,-.94,82%. Adapun kegiatan untuk Pembangunan Jalan Lingkungan adalah :

Tabel 3.16 Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume Meter	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Pembangunan Jalan Lingk Lorong Dua Belakang SDN 023 Dara, Kelurahan Darma, Kec. Polewali	195	Rp. 187.590.000	DAU
2	Pembangunan Jalan Lingkungan Kel.Madatte (Rumah Qur,ani)	200	Rp. 192.400.000	DAU
3	Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kel.Pappang	962	Rp.184.704.000	DAU

Gambar 3.8 Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Belakang SD 23 Kelurahan Darma



Progres 0% (MC 0)

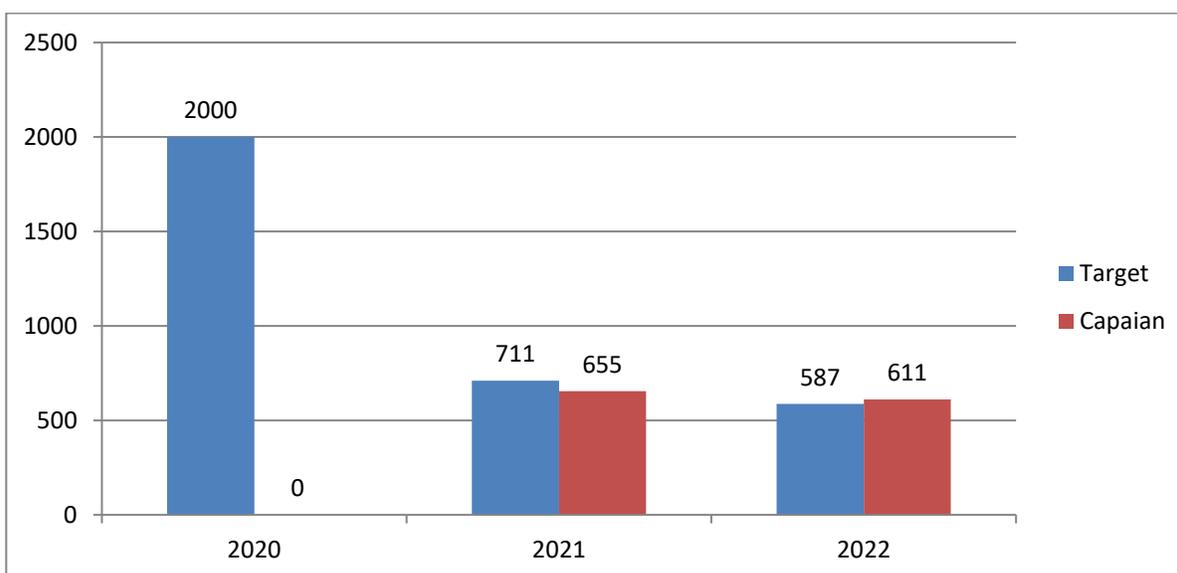
Progres 100%

Tabel 3.17 Perbandingan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Tahun 2020, 2021 dan 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciptakaryaannya	Panjang jalan lingkungan yang terbangun	2000	-	711	655	587	611

Tabel diatas menunjukkan bahwa melampaui target.

Grafik 3.6 Grafik Perbandingan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Tahun 2020, 2021 dan 2022



Dalam pelaksanaannya kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan memiliki beberapa permasalahan antara lain :

1. Terkait pembebasan lahan yang belum jelas
2. Minimnya anggaran pembangunan Jalan Lingkungan.

Dari permasalahan tersebut ada solusi yang dapat di tempuh agar permasalahan tersebut dapat diatasi antara lain :

1. Berkoordinasi dengan instansi/ pihak yang terkait dengan pembebasan lahan
2. Penyediaan anggaran untuk kegiatan pembangunan jalan lingkungan.

### **A.3.3. Persentase Pelayanan Akses Air Minum**

#### **A.3.3.1 Jumlah Penerima Manfaat Air Minum**

Bidang Cipta Karya sebagai bidang yang bertanggung jawab dalam kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, di tahun 2022 pembangunan SPAM tersebar di 6 kecamatan. Pada kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.12.479.271.800,-. Anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp. 5.169.879.800,- dan Anggaran APBN Rp.7.309.392.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.10,359,485,386,- 83%. Di tahun 2022 menargetkan jumlah jiwa yang terlayani air minum sebesar 8390 jiwa namun yang terealisasi sebesar 9005 jiwa. Adapun kegiatan untuk Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan adalah :

Tabel 3.18 Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Galung Tulu Kec. Balanipa	61 SR	Rp 720.000.000	DAK
2	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kunyi Kec. Anreapi	144 SR	Rp 1.780.000.000	DAK
3	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lilli Kec. Matangnga	35 SR	Rp 825.000.000	DAK
4	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Kel. Balanipa Kec. Balanipa	51 SR	0Rp. 659.995.000	DAK
5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ambopadang Kec. Tutar	67 SR	Rp. 1.110.161.076	DAK

6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pappadangan Kec. Anreapi	104 SR	Rp. 1.173.265.500	DAK
7	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kelurahan Batupanga Kec. Luyo	88 SR	Rp. 719.400.664	DAK

Gambar 3.9 Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan di Kelurahan Balanipa



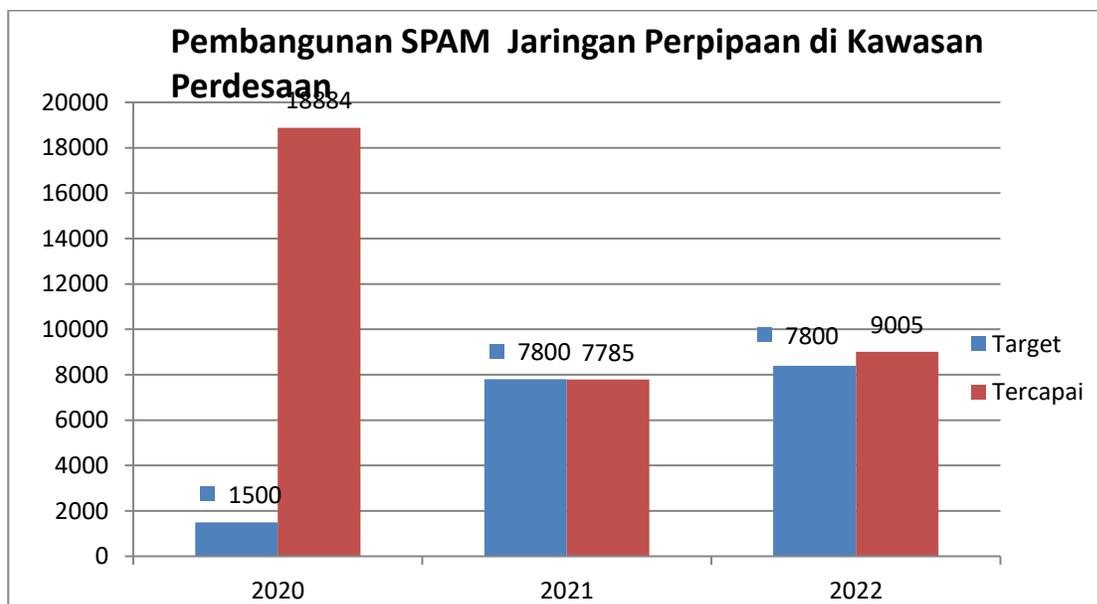
Progres 0% (MC 0)

Progres 100%

Tabel: 3.19 Perbandingan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2020, 2021 dan 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciptakaryaannya	Jumlah penerima manfaat air minum Jiwa air	1500 jiwa	18.884 jiwa	7800 jiwa	7785 jiwa	8390 jiwa	9005 jiwa

Grafik: 3.7 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Tahun 2020, 2021 dan 2022



Grafik diatas menunjukkan bahwa kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan melampaui dari target.

Dalam pelaksanaannya kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (Air Bersih) memiliki beberapa permasalahan antara lain :

1. Sulitnya mendapatkan sumber air baku yang akan memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat.
2. Lokasi sumber air baku pada sebagian wilayah berada jauh dari permukiman masyarakat sehingga membutuhkan material pipa yang tidak sedikit, sehingga berpengaruh terhadap penyediaan anggaran
3. Pemanfaatan asset belum maksimal disebabkan beberapa lokasi sudah terpasang jaringan pipa distribusi masyarakat namun belum terkoneksi dengan PDAM

Dari permasalahan tersebut ada beberapa solusi yang dapat di tempuh agar beberapa permasalahan tersebut dapat diatasi antara lain :

1. Menyiapkan master plan sumber air baku jaringan pipa untuk kawasan perkotaan, wilayah perdesaan dan pesisir
2. Mengendalikan penebangan pohon atau meningkatkan penghijauan di sekitar sumber air baku.
3. Memaksimalkan peran serta masyarakat pemanfaat dalam pemeliharaan sumber air baku, pembangunan jaringan perpipaan agar biaya yang ditimbulkan dapat di tekan dan kualitas air bisa dipertahankan
4. Meningkatkan koordinasi antara PDAM dan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengenai penyerahan asset dan penyediaan air bersih.

#### **A.3.4. Persentase Akses Sanitasi Layak**

##### **A.3.4.1 Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak**

Ditahun 2022 ini Bidang Cipta Karya sebagai bidang yang bertanggung jawab dalam kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pada kegiatan ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 4.007.819.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.615.455.616,- 92%. dengan menargetkan jumlah rumah tangga yang berakses sanitasi yang layak sebesar 500 RT namun yang teralisasi 141 RT tidak tercapainya target terbatasnya anggaran yang tersedia. Adapun kegiatan untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah :

Tabel 3.20: Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Pembangunan IPAL Komunal Lapas Kelas II B Polewali Mandar	1 Paket	Rp 200.000.000	DAU
2	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman	50 KK	Rp 536.500.000	DAK

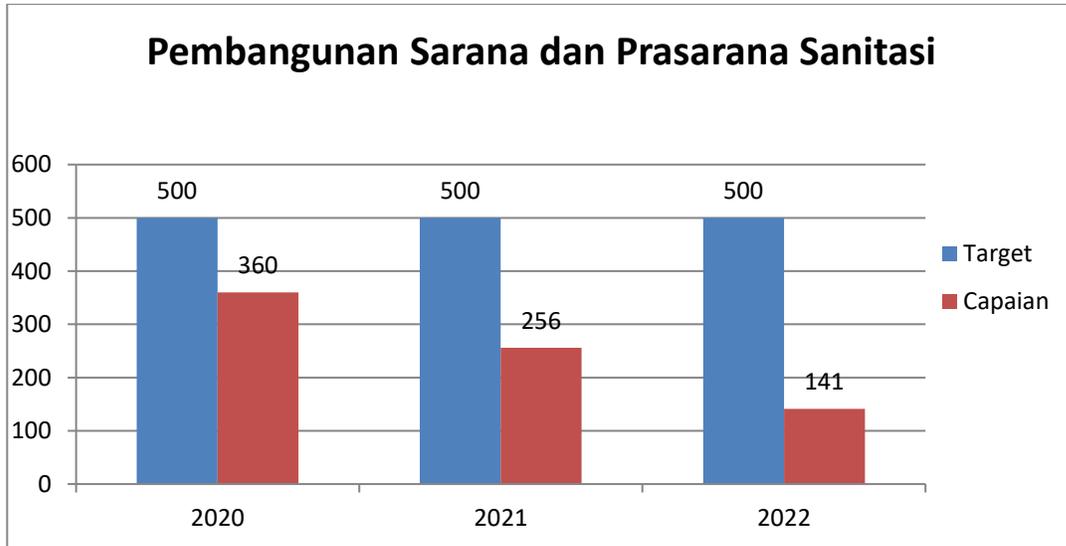
	Kombinasi MCK Minimal 50 KK Desa Batulaya Kec. Tinambung			
3	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK Desa Lapeo Kec. Campalagian	50 KK	Rp 536.500.000	DAK
4	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK Desa Sambali Wali Kec. Luyo	50 KK	Rp 536.500.000	DAK
5	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK Kel. Lantora Kec. Polewali	50 KK	Rp 536.500.000	DAK
6	Pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK Minimal 50 KK Kel. Takatidung Kec. Polewali	50 KK	Rp 536.500.000	DAK
7	Pengadaan Truk Tinja Kelurahan Polewali	1 Unit	Rp 600.000.000	DAK

Tabel 3.21 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2020, 2021 dan 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya akses sanitasi yang layak dan aman	Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi yang Layak	500	360	500	256	500	141

Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak tercapainya target disebabkan terbatasnya anggaran.

Grafik: 3.8 Perbandingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Tahun 2020, 2021 dan 2022



Grafik diatas menunjukkan bahwa kegiatan tidak mencapai target disebabkan terbatasnya anggaran.

Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Kel. Lantora Kec. Polewali



Progres 0% (MC0)

Progres 100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022

Dalam pelaksanaannya kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota memiliki beberapa permasalahan antara lain :

1. Terbatasnya lahan yang tersedia oleh masyarakat untuk lokasi pembangunan SPALD
2. Adanya tuntutan ganti rugi lahan masyarakat yang sudah tidak sesuai dengan Surat Pernyataan Hibah Lahan dan Surat Kesiapan Pengelolaan oleh Pemerintah Desa pada saat Sosialisasi Awal yang pernah dilakukan oleh Dinas PUPR bersama Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), Tahap Penyusunan RKM maupun pada Tahap Pelaksanaan Konstruksi di lapangan
3. Adanya kondisi jarak rumah penerima manfaat yang saling berjauhan menyebabkan dibutuhkan biaya pembangunan jaringan perpipaan yang lebih besar sehingga jumlah penerima yang dapat tersentuh oleh program harus menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia
4. Adanya perubahan volume pekerjaan dilapangan pada tahap konstruksi akibat dilakukannya revisi desain yang disebabkan karena adanya perubahan kondisi lapangan seperti tersebut diatas yang secara teknis sudah tidak sesuai dengan dokumen RKM yang terdapat dalam Kontrak Kerja.
5. Pada Tahap Pasca Konstruksi, Penyerahan (Serah Terima) Aset dan Pengelolaan Prasarana IPAL DAK yang telah terbangun oleh Dinas PUPR ke Pemerintah Desa dan/atau Pengelola IPAL (KSM) yang meliputi kewajiban melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan Surat Pernyataan Kesiapan Pengelola yang telah dibuat sebelumnya oleh Pemerintah Desa ke Dinas PUPR pada saat tahapan pengusulan program, ternyata tidak dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa dan/atau KSM sehingga layanan Sanitasi untuk masyarakat seringkali terhambat ketika terjadi penumpukan sedimen sampah pada jaringan pipa air limbah sehingga terjadi pemampatan/buntu dan menimbulkan bau tidak sedap di sekitarnya
6. Bangunan MCK Plus tidak dimanfaatkan secara optimal oleh warga karena disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memelihara prasarana IPAL dan MCK yang telah terbangun dalam bentuk iuran pengguna sehingga menyulitkan bagi KSM dalam melaksanakan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan misalnya untuk pembelian Token Listrik untuk Pompa Air MCK, Sabun Cuci dan Alat-Alat Kebersihan untuk KM/WC dan Upah Tukang Pembersihnya

Dari permasalahan tersebut ada beberapa solusi yang dapat di tempuh agar beberapa permasalahan tersebut dapat diatasi antara lain :

1. Dinas PUPR dalam proses pengusulan anggaran di pusat selanjutnya, maka hanya akan mengusulkan desa calon penerima program SPALD yang benar-benar tersedia lahannya oleh masyarakat yang dibuktikan dengan Surat Hibah Lahan dan Pernyataan Komitmen dari Pemilik Lahan dan Pemerintah Desa agar bertanggung jawab kepada Dinas PUPR jika terjadi permasalahan lahan ketika pekerjaan dalam masa konstruksi dan saat pasca konstruksi
2. Dalam proses pemilihan lokasi rumah calon penerima manfaat, maka akan lebih diprioritaskan pada rumah-rumah yang terdapat pada lokasi kawasan kumuh dan padat penduduk sehingga jarak rumah penerima manfaat lebih pendek dan biaya pembangunan jaringan perpipaan yang dibutuhkan sesuai dengan dengan alokasi anggaran yang tersedia
3. Dinas PUPR dan Pemerintah Desa harus berkoordinasi dengan baik agar di lapangan agar Adanya permintaan perubahan pelaksanaan pekerjaan dilapangan oleh masyarakat setempat yang sudah tidak sesuai dengan alokasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) agar dapat diminimalisir dan dikomunikasikan dengan baik oleh Pemerintah Desa kepada Masyarakatnya
4. Dinas PUPR dalam proses pengusulan anggaran di pusat selanjutnya, maka hanya akan mengusulkan desa calon penerima program SPALD yang benar-benar mendapatkan dukungan Anggaran Operasi dan Pemeliharaan Prasarana SPALD yang bersumber dari BUMDES tanpa tergantung dengan besarnya partisipasi masyarakat dalam bentuk iuran wajib yang di Kelola oleh KSM sehingga prasarana yang terbangun dapat terus dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat

### **A.3.5. Persentase Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum Kondisi Baik**

#### **A.3.5.1 Jumlah Unit Bangunan Gedung Daerah yang Terbangun**

Ditahun 2022 ini Bidang Cipta Karya sebagai bidang yang bertanggung jawab dalam Program Penataan Bangunan Gedung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.619.760.970,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp.21.421.780.330,- 77,55%. Jumlah Unit Bangunan Gedung Daerah yang Terbangun yang ditargetkan di bangun tahun 2022 ini sebanyak 5 unit terealisasi sesuai dengan target. Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum yang terbangun di tahun anggaran 2022 ini yaitu :

Tabel 3.22 Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Rehabilitasi Kantor PUPR	1 Paket	Rp. 173.880.000	DAU
2	Lanjutan Kantor Inspektorat Tahap 3	1 Paket	Rp. 199.800.000	DAU
3	Rehabilitasi Kantor Sub Denpom XIV/2 Polewali Mandar	1 Paket	Rp. 173.805.000	DAU
4	Pembangunan Masjid jalan Kartini Tahap 2	1 Paket	Rp. 19.296.212.000	DAU
5	Pembangunan Asrama Jogja Tahap 3	1 Paket	Rp. 1.459.919.001	DAU

Gambar 3.8 Dokumentasi Pembangunan Masjid Jalan Kartini



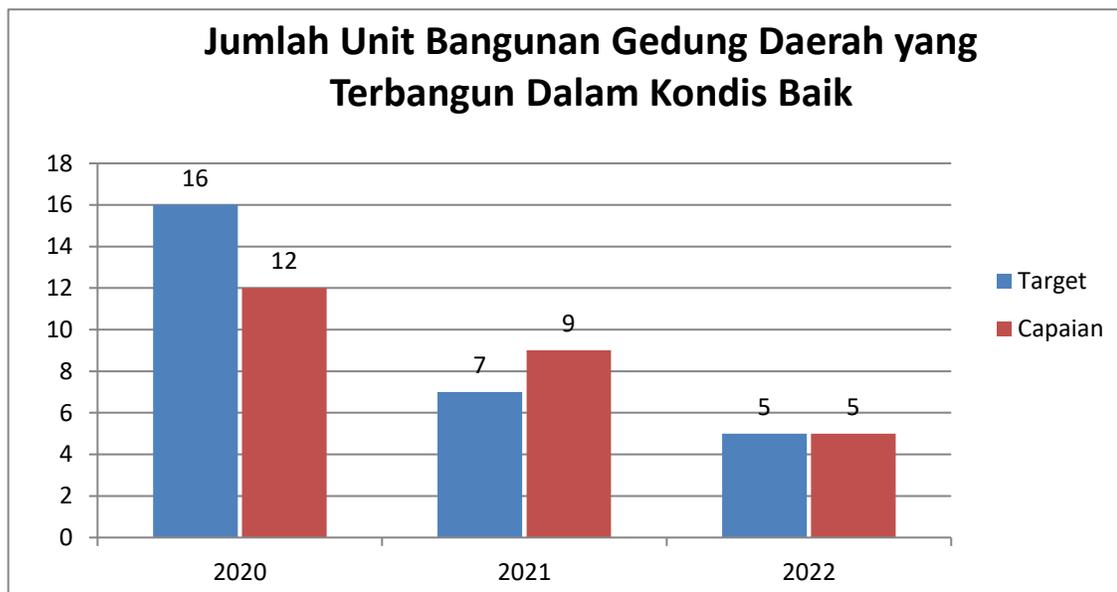
Progres 100% (MC0)

Tabel 3.23 Perbandingan Jumlah Unit Bangunan Gedung Daerah yang Terbangun Tahun 2020, 2021 dan 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah unit	16	12	7	9	5	5

Tabel diatas menunjukkan bahwa kegiatan Pembangunan Sarana Pemerintahan dan Prasana Umum dalam Kondisi Baik mencapai target.

Grafik 3.9. Perbandingan Jumlah Unit Bangunan Gedung Daerah yang Terbangun dalam Kondisi Baik Tahun 2020, 2021 dan 2022.



### A.3.6. Persentase Ketersediaan Sistem dan Prasarana Pengolahan Persampahan

#### A.3.6.1 Jumlah Unit TPS3R yang Terbangun

Ditahun 2022 ini Bidang Cipta Karya sebagai bidang yang bertanggung jawab dalam Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.513.151.500,-. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.714.759.000,- 68,23%. Jumlah unit TPS3R yang dibangun yang ditargetkan di bangun tahun 2022 ini sebanyak 3 unit terealisasi sesuai dengan target. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di tahun anggaran 2022 ini yaitu :

Tabel 3.24 Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

No.	Nama Paket Pekerjaan	Volume	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	Pembangunan TPS3R Desa Bala Kec. Balanipa	1 Paket	Rp. 550.000.000	DAU
2	Pembangunan TPS3R Desa Laliko Kec. Campalagian	1 Paket	Rp. 550.000.000	DAU
3	Pembangunan TPS3R Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo	1 Paket	Rp. 550.279.000	DAU

Gambar 3.8 Dokumentasi Pembangunan TPS3R kelurahan Sidodadi



Progres 0% (MCO)

Progres 100% (MCO)

Tabel: 3.25 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Keciptakarya

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Analisa Capaian Indikator Kinerja	Penjelasan Gagal/ Berhasil
<p><b>Program</b> Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase drainase kawasan perkotaan dalam kondisi baik</li> </ul>	68,15%	56,02%	82,20%	Realisasi Indikator Program (56,02%) lebih kecil dari target (68,15%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (82,20%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil". Dana yang disediakan tidak cukup untuk mencapai target
<p><b>Kegiatan</b> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi</li> </ul>	11.500 meter	123.671 meter	107,54%	Realisasi Indikator kegiatan (123,671 meter) lebih besar

<p>baik</p> <p><b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Panjang drainase yang terbangun</li> </ul>	493 meter	1043 meter	2,115%	<p>dari target (11.500 meter). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (107,54%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".</p> <p>Realisasi Indikator sub kegiatan (1043 meter) lebih besar dari target (493 meter). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (2,115%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".</p>
<p><b>Program</b> Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Jalan Lingkungan kawasan perkotaan dalam kondisi baik</li> </ul>	80,3%	61,38%	58,89%	<p>Realisasi Indikator Program (61,38%) lebih kecil dari target (80,3%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (58,89%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil".</p>
<p><b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Panjang jalan lingkungan kawasan perkotaan yang ditingkatkan</li> </ul>	11.500 meter	67.751 meter	589%	<p>Realisasi Indikator kegiatan (67.751 meter) lebih besar dari target (11.500 meter). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (589%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".</p>
<p><b>Sub Kegiatan</b> Penataan Bangunan dan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Panjang jalan lingkungan kawasan perkotaan yang ditingkatkan</li> </ul>	587 meter	611 meter	1,04%	<p>Realisasi Indikator sub kegiatan (611 meter) lebih besar dari target (587 meter). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (1,04%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".</p>

<p><b>Program</b> Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pelayanan akses air minum</li> </ul>	94%	86,84%	92,38%	Realisasi Indikator Program (86,84%) lebih kecil dari target (94%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (92,38%) Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil".
<p><b>Kegiatan</b> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Jiwa Pemanfaat air minum</li> </ul>	7500 jiwa	387,441 jiwa	5,165%	Realisasi Indikator kegiatan (387,441%) lebih besar dari target (7500%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (5,165%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil".
<p><b>Sub Kegiatan</b> Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Jiwa penerima manfaat air minum di Kawasan Perdesaan</li> </ul>	8390 jiwa	9005 jiwa	1,07%	Realisasi Indikator sub kegiatan (9005%) lebih besar dari target (8390%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (1,07%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
<p><b>Program</b> Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase akses sanitasi yang layak</li> </ul>	96%	94%	97,91%	Realisasi Indikator Program (94%) lebih kecil dari target (96%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (97,91%) Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil". Dana yang disediakan tidak cukup untuk mencapai target.
<p><b>Kegiatan</b> Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	96%	94%	97,91%	Realisasi Indikator Kegiatan (94%) lebih kecil dari target (96%). Analisa Capaian

<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase RT berakses sanitasi yang layak dan aman</li> </ul> <p><b>Sub Kegiatan</b> Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah rumah tangga berakses sanitasi yang layak</li> </ul>	500 RT	141 RT	0,28%	<p>Indikator Kinerja sebesar (97,91%). Indikator Kinerja % masuk pada kategori "Tidak Berhasil".</p> <p>Realisasi Indikator sub kegiatan (141 RT) lebih kecil dari target (500 RT). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (0,28%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil". Dana yang disediakan tidak cukup untuk mencapai target.</p>
<p><b>Program</b> Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penanganan Sampah</li> </ul>	100%	100%	100%	<p>Realisasi Indikator Program (100%) lebih kecil dari target (100%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".</p>
<p><b>Kegiatan</b> Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah RT terlayani penanganan sampah</li> </ul>	600 RT	600 RT	100%	<p>Realisasi Indikator Kegiatan (600 RT) sama besar dari target (600 RT). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja % masuk pada kategori "Sangat Berhasil".</p>
<p><b>Sub Kegiatan</b> Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Unit TPA yang di bangun</li> </ul>	1 Unit	3 Unit	300%	<p>Realisasi Indikator sub kegiatan (3 unit) lebih besar dari target (1 unit). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (300%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".</p>
<p><b>Program</b> Penataan Bangunan Gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase prasarana</li> </ul>				<p>Realisasi Indikator program</p>

pemerintahan dan sarana umum dalam kondisi baik	86,76 %	86,76 %	100%	(86,76 %) sama besar dari target (86,76%). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		86 %		Realisasi Indikator Kegiatan (100 %) sama besar dari target (100 %). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja % masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
• Persentase Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum dalam Kondisi Baik	86 %		100%	
<b>Sub Kegiatan</b> Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		5 Unit		Realisasi Indikator sub kegiatan (5 unit) lebih besar dari target (5 unit). Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
• Jumlah unit bangunan gedung daerah yang terbangun	5 Unit		100%	

#### **A.4. Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi**

Pengukuran indikator Indeks kepuasan layanan jasa konstruksi dari sasaran Meningkatnya kualitas jasa konstruksii ini diukur dengan memberikan nilai pada masing-masing jenis informasi yang diberikan. Target **Baik** untuk Program Pembinaan Jasa Konstruksi dengan pagu anggaran Rp.768.336.600, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 768.336.600,- 100%. Program ini melaksanakan 3 kegiatan yaitu:

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kabupaten/Kota

3. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

➤ **Permasalahan**

- 1) Kurangnya SDM tentang pemahaman teknis Bina Konstruksi.
- 2) Kurangnya pemahaman penyedia jasa konstruksi terkait teknis bina konstruksi
- 3) Minimnya anggaran yang tersedia dalam pembelian alat laboratorium konstruksi.

➤ **Solusi**

- 1) Melakukan pelatihan penguatan kapasitas SDM terkait teknis bina konstruksi
- 2) Perlu bimbingan dan pelatihan bagi penyedia jasa konstruksi menyangkut masalah teknis dan manajemen pelaksanaan pekerjaan, agar tercipta pemahaman yang sama antar unsur proyek (pengguna jasa, penyedia jasa dan masyarakat/ stakeholder yang ada).
- 3) Tersedianya anggaran pengadaan alat laboratorium konstruksi

### **A.5 Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Ruang**

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ini mempunyai tujuan mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik, kongkrit sesuai dengan tata ruang dengan target Persentase pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukannya sebesar 50% dengan pagu anggaran Rp. 886.434.800, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 779.520.550,- 87,94%. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang melaksanakan 3 kegiatan yaitu:

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

➤ **Permasalahan**

- 4) Kurangnya SDM tentang Pemahaman Penyusunan Perencana mengenai Penataan Ruang.
- 5) Minimnya anggaran yang tersedia dalam penyusunan pedoman RDTR.

➤ **Solusi**

- 4) Melakukan pelatihan penguatan kapasitas SDM terkait penataan ruang
- 5) Penyediaan anggaran karena dalam penyusunan dokumen RDTR membutuhkan anggaran yang besar.

**B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tahun 2022 mengelola anggaran sebesar Rp. **101.257.368.492,-** dan terealisasi sebesar Rp. **80.103.871.186,-**. Atau sebesar **79%**. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang realisasi anggarannya tidak mencapai 100% di sebabkan ada beberapa kegiatan fisik mengalami **Retensi** anggaran.

**Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kebinamargaan**

Untuk mencapai sasaran tersebut maka Program kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

**Tabel 3.26 Program Penyelenggaraan Jalan**

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI ANGGARAN					
		APBD KAB	DAK	JUMLAH	FISIK (%)	Rp.	%
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / kota		18.415.761.925	16.865.638.000	35.281.399.925		25,129,935,705	71,22
	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	15,173,675,975	16.865.638.000	32,039,313,975	71,20 %	23,953,022,275	74,76
	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	3,242,085,950		3,242,085,950	67,03 %	1,176,913,430	36,30

Berdasarkan tabel 3.26 Program Penyelenggaraan Jalan dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan terdapat 2 (Dua) indikator yaitu Persentase jalan kabupaten dalam kondisi Mantap (Sedang), (Baik) dan Persentase jembatan dalam kondisi baik. Menggunakan anggaran APBD Kabupaten dan APBN Rp. 35.088.367.025,-,realisasi keuangan RP. 25.129.935.705,- atau 71,22%.- Kurangnya realisasi anggaran di sebabkan adanya retensi anggaran.

**Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air**

Untuk mencapai sasaran tersebut maka Program kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

**Tabel 3.27 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI ANGGARAN					
		APBD KAB	DAK	JUMLAH	FISIK (%)	Rp.	%
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1,935,433,750		1,935,433,750	45,45 %	1,442,817,400	74,54
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1,817,728,368	1,003,325,000	2,821,053,368	84,35 %	2,130,535,257	75,52

Berdasarkan tabel 3.27 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terdiri dari Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan dana APBD Kab sebesar Rp. 1.935.433.750 dengan realisasi keuangan Rp. 1.442.817.400,- 74,54%. Kurangnya realisasi anggaran di sebabkan adanya retensi anggaran.

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan dana APBD Kab. Dan APBN sebesar Rp. 2.821.053.368,- dengan realisasi keuangan Rp. 2.130.535.368,- 75.52% Kurangnya realisasi anggaran di sebabkan adanya retensi anggaran.

**Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Permukiman**

Untuk mencapai sasaran tersebut maka Program /kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

**Tabel 3.28. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI ANGGARAN					
		APBD KAB	DAK	JUMLAH	FISIK (%)	Rp.	%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung		4,363,074.700		4,363,074.700	56,02 %	3.952.817.260	90,59

Berdasarkan tabel 3.28 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota menggunakan anggaran APBD Kab Rp. 4,363,074.700, realisasi keuangan 3.952.817.260,- 90,59%. Kurangnya realisasi anggaran di sebabkan adanya retensi anggaran

**Tabel 3.29. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI ANGGARAN					
		APBD KAB	DAK	JUMLAH	FISIK (%)	Rp.	%
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di		616.456.600		616.456.600	61,38	584.497.500	94.42

Daerah Kabupaten/Kota							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel 3.29 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya terdiri dari kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran APBD Kab. sebesar Rp. 616.456.600,- realisasi keuangan 94,42%.

**Tabel 3.30 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI ANGGARAN					
		APBD KAB	DAK	JUMLAH	FISIK (%)	Rp.	%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		5.169.879.80	7.309.392.000	12.479.271.80 0	86,84	10.539.485.386	83

Berdasarkan tabel 3.30. Program Penataan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran APBN sebesar Rp 7.309.392.000.- dan anggaran APBD Kab. sebesar Rp. 5.169.879.800,-. Total anggaran Rp. 12.479.271.800,- dengan realisasi keuangan Rp. 10.539.485.386,- 83%.

**Tabel 3.31. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI ANGGARAN					
		APBD KAB	DAK	JUMLAH	FISIK (%)	Rp.	%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase akses sanitasi yang layak	640.249.600	3.367.570.000	4.007.819.500	94	3.615.455.616	90,21

Berdasarkan tabel 3.31 program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran APBN sebesar Rp 3.367,570,000 dan anggaran APBD Kab. sebesar Rp.640.249.500, Total anggaran Rp. 4.007.819.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 3.615.455.616,- Persentase 90,21%.

**Tabel 3.32. Program Penataan Bangunan Gedung**

KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	REALISASI ANGGARAN					
		APBD KAB	DAK	JUMLAH	FISIK (%)	Rp.	%
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum dalam Kondisi Baik	27.619.760.970		27.619.760.970	86%	21,421,780,330	77,55

Berdasarkan tabel 3.32 Program Penataan Bangunan Gedung dengan menggunakan anggaran APBD sebesar Rp 27.619.760.970,- dengan realisasi keuangan Rp. 21,421,780,330,- dengan persentase 77,55%. Tidak tercapainya realisasi anggaran 100% karena adanya retensi anggaran.

**Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Jasa Konstruksi**

Untuk mencapai sasaran tersebut maka Program/kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

**Tabel 3.33. Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

No	KEGIATAN	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV						
		APBD KAB.	DAK	APB D PRO	JUMLAH	FISI K (%)	KEUANGAN	
							Rp.	%

1	2	3	4	V. 5	6	7	8	9
1	Penyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	185.198.700			185.198.700	100	185.198.700	100
2	Penyelenggaraa n Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kabupaten/Kota	189.982.800			189.982.800	100	189.982.800	100
3	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraa n dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	393.155.100			393.155.100	100	393.155.100	100

Berdasarkan tabel 3.33 Program Pembinaan Jasa Konstruksi terdiri dari kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan menggunakan anggaran APBD Kab. sebesar Rp. 185.198.700,- dengan realisasi keuangan sebesar 100%. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan anggaran APBD Kab. Sebesar Rp 189.982.800.- realisasi keuangan 100%. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan Menggunakan anggaran APBD Kab. sebesar Rp 393.155.100,- dengan realisasi keuangan sebesar 100%.

**Sasaran 5 : Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Ruang**

**Tabel 3.34. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

No.	PROGRAM KEGIATAN	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV						
		APBD KAB.	DAK	APB D PRO V.	JUMLAH	FISI K (%)	KEUANGAN	
							Rp.	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Penataan Ruang	154.564.500			154.564.500	100	154.564.500	100

2	Koordinasi dan Singkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/kota	517.121.600			517.121.600	90	418,332,950	81
3	Koordinasai dan Singkronisasi Penertiban dan penegakkan Hukum Bidang Penataan Ruang	214.748.000			214.748.000	100	214.748.000	100

Berdasarkan tabel 3.34 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri dari kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Penataan Ruang dengan menggunakan anggaran APBD Kab. sebesar Rp. 154.564.500,- dengan realisasi keuangan sebesar 100%.. Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/kota dengan menggunakan anggaran APBD Kab. Sebesar Rp 517.121.600,- ,realisasi keuangan Rp. 418.332.950,- atau 81%,. Pada kegiatan ini anggarannya tidak terealisasi 100% disebabkan adanya Revisi RTRW yang belum rampung karena kegiatan itu menjadi acuan penggunaan anggaran sehingga anggaran yang tersedia tidak teralisasi sepenuhnya. Koordinasai dan Singkronisasi Penertiban dan penegakkan Hukum Bidang Penataan Ruang Pagu anggaran Rp. 214.748.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 214.748.000,- 100%.

**Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah**

**Tabel .3.35. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**

No	Kegiatan	REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV						
		APBD KAB.	DAK	APB D PRO V.	JUMLAH	FISI K (%)	KEUANGAN	
							Rp.	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.819.400			66.819.400	100	66.819.400	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,550,808,997			9,550,808,997	100	9,419,843,122	99
	Administrasi Kepegawaian	-			-		-	-

3	Perangkat Daerah							
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	389.856.600			389.856.600	88	368,874,747	94,61
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45,245,400			45,245,400	100	45,245,400	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,200,000			10,200,000	100	10,200,000	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356,020,600			356,020,600	100	338,166,330	94,98

Berdasarkan tabel 3.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan menggunakan anggaran APBD Kab. sebesar Rp. 10.418.950.997,- dengan realisasi keuangan 10.249.148.999 atau sebesar 98,37%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 disusun untuk memaparkan pencapaian Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja yang telah dicapai dalam tahun anggaran 2022. Pemaparan capaian kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar terhadap publik. Laporan ini diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja dan penyempurnaan strategi pencapaian sasaran kinerja.

Ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi dalam hal penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ini yaitu :

1. Gambaran umum tentang pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2022 dapat dikatakan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, beberapa kegiatan tidak mencapai target bahkan ada yang melampaui dari target.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Sebagian besar masalah utamanya masih membutuhkan tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Solusi, agar kedepannya lebih berhati-hati dalam menentukan proyeksi target agar dapat memenuhi pencapaian sasaran yang telah ditentukan berdasarkan anggaran yang disediakan.
3. Realisasi anggaran masih mengalami keterlambatan, hal ini terutama disebabkan oleh proses perencanaan dilaksanakan pada tahun yang bersamaan sehingga pelelangan terlambat dilaksanakan akhirnya tidak menyediakan tenggang waktu pelaksanaan yang cukup dan jangka waktu pemeliharaan selama 6 ( enam ) bulan, akan mengakibatkan setidaknya dana sebesar 5% dari nilai proyek mengalami *retensi*, hal ini mempengaruhi

beban pendanaan pada tahun berikutnya belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

4. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dilingkup interen maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk meminimalisir terjadinya kesalahan sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 ini disampaikan untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan selanjutnya. Dengan keterbatasan tenaga dan waktu yang ada pada kami, kritik dan saran kami harapkan dari pihak lain guna menyempurnakan laporan ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita bimbingan, Rahmat, dan Karunia-Nya kepada kita semua dalam rangka melaksanakan tugas di masa mendatang.

Polewali, 21 Februari 2023

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG,**

**Ir. HUSAIN ISMAIL, ST.,M.AP**

Pangkat : Pembina

NIP : 19720809 200502 1 003











